



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bappebti/Mjl/130/XI/2012/Edisi Januari

KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS

SRG Penyeimbang Konsumen & Produsen



Inatin Naikan Posisi
Tawar Indonesia

Antisipasi Lonjakan
Pembentukan SRG

Kemenkominfo &
Bappebti Bakal Blokir
Website Illegal



DARI REDAKSI



Foto : Konsinyering Redaksi Buletin Kontrak Berjangka.

PERUBAHAN. Memasuki usia Ke 11 tahun Buletin Kontrak Berjangka kembali menyajikan perubahan baik tampilan maupun perwajahan. Perubahan itu senantiasa dilakukan untuk memberi kenyamanan bagi para pembaca setia mengikuti informasi atau perkembangan industri perdagangan berjangka komoditi di dalam negeri, sistem resi gudang dan pasar fisik komoditi.

Terkait dengan perubahan itu, Redaksi Buletin Kontrak Berjangka pada 25 -26 Januari 2012, di Ancol, Jakarta, mengundang seluruh unit Bappetebi untuk merapatkan pematangan dan pemantapan perubahan tersebut.

Selain melakukan perubahan tampilan dan perwajahan, Redaksi Buletin Kontrak Berjangka juga berkomitmen untuk memperkaya informasi dan wawasan pembaca di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar fisik komoditi.

Pembaca budiman, edisi pertama

ditahun ke 11 ini, Redaksi tetap merangkum berbagai berita dan informasi dari berbagai kegiatan di bidang perdagangan berjangka, sistem resi gudang dan pasar fisik komoditi. Diantaranya sajian yang disampaikan Redaksi adalah laporan kegiatan Wamendag, Bayu Krisnamurthi, bersama Forum Wartawan Kementerian Perdagangan (Forward) mengunjungi gudang sistem resi gudang di Haur Geulis, Indramayu, Jabar. Selain melakukan kunjungan gudang, Wamendag, Bayu Krisnamurthi, bersama Kepala Bappetebi, Syahrul R. Sempurnajaya, Anggota DPR RI, Yusyus Kuswandana, dan pelaku sistem resi gudang lainnya juga melakukan dialog tentang peluang dan tantangan sistem resi gudang pasca amandemen UU No. 9/2011.

Lebih lengkap laporan kunjungan dan dialog tentang sistem resi gudang tersebut, serta informasi lainnya, silahkan dibaca buletin kesayangan kita ini. Salam!



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KONTRAK
BERJANGKA
MENGABDI DENGAN INTEGRITAS

Penerbit
Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

**Penasihat/Penanggung
Jawab**
Syahrul R. Sempurnajaya

Pemimpin Redaksi
Nizarli

Wakil Pemimpin Redaksi
Natalius Nainggolan

Dewan Redaksi
Harry Prihatmoko, Diah
Sandita Arisanti, Poppy
Juliyanti, Subagyo,
Dharmayugo Hermansyah, Sri
Haryati, Rizali Wahyuni

Sirkulasi
Sapin Siswantoro, Katimin.

Alamat Redaksi
Gedung Bappetebi Jl. Kramat
Raya No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappetebi.go.id

*Redaksi menerima artikel
ataupun opini dikirim lengkap
dengan identitas serta foto ke
E-mail:
buletin@bappetebi.go.id*



Berita Utama.....4-5

- SRG Penyeimbang Konsumen & Produsen
- Efektifitas SRG Minimal 10% Dari Produksi

Berjangka6-7

- Inatin Naikan Posisi tawar Indonesia

Resi Gudang8-9

- Antisipasi Lonjakan Pembiayaan SRG

Pasar Lelang.....10-11

- Lelang Puspa Agro Naik 59%
- PLKA Mataram Naik Peringkat

Agenda Foto14-15

Aktualita.....16-17

- Kemenkominfo & Bappebti Bakal Blokir Website Illegal
- JFX Mimpi Go Public 2015
- BAF Kembali Beroprasional
- BKDI Tambah Anggota Genjot PALN

Analisa.....18

Info Harga.....19

Wawasan.....24-25

- Isi Pokok UU No. 10/2011

Kolom.....26-27

- Kelembagaan Lumbung & Gudang Pangan

Breaknews.....22

Interview...12-13

Sukses SRG
Lewat GP3K



Komoditi...22-23

Wijen Minyak Nabati Sehat



Kiprah...26-27

OCF 'Anak Kandung' BKDI





SRG Penyeimbang Konsumen & Produsen

Jaringan pergudangan komoditi pangan sangat diperlukan di tengah kekurangan pasokan. Karena itu, jaringan pergudangan komoditi pangan menjadi perhatian serius dunia saat ini.

Sistem Resi Gudang (SRG), bursa berjangka komoditi dan pasar fisik komoditi dinamakan *organized market* atau pasar yang terorganisir. Dan pasar ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa guna memenuhi apa yang diperlukan oleh masyarakat.

Tujuan didirikannya *organized market* adalah membuat informasi menjadi lebih transparan, terbuka, dan pada saat yang sama juga membuat para pelaku bisa berada pada posisi setara atau seimbang satu sama lain.

“Tapi disaat yang sama, pasar juga memiliki kelemahan dan keterbatasan. Pasar bisa sangat dipengaruhi oleh sifat yang tidak transparan dan ketidaksempurnaan informasi yang dimiliki oleh pelaku,” demikian antara lain diutarakan Wamendag, Bayu Krisnamurthi, saat melakukan kunjungan gudang sistem resi gudang (SRG) PT Pertani (Persero) bersama Forum Wartawan Kementerian Perdagangan (Forward) pada 28 Januari 2012, di Haur Geulis, Indramayu, Jabar.

Selain melakukan kunjungan gudang, Wamendag, Bayu Krisnamurthi, bersama Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, Anggota DPR RI, Yusyus Kuswandana, Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia, Surdianto Suryodarmojo dan Dirut PT Pertani, Dwi Antono, juga melakukan dialog tentang peluang dan tantangan sistem resi gudang pasca amandemen UU No. 9/2011.

Lebih jauh diutarakan Wamendag, diberlakukan Undang-Undang No. 9/2011, membuat sistem perdagangan menjadi lebih transparan, sehingga dapat memberikan man-

faat bagi semua stakeholder perdagangan.

“Kementerian Perdagangan itu stakeholder-nya adalah nomor satu adalah konsumen. Kami bertugas untuk memastikan agar kepentingan konsumen benar-benar bisa terpenuhi, salah satunya dalam hal menjaga stabilitas harga, kemudian kelancaran arus barang, dan perlindungan konsumen, serta standardisasi,” jelasnya.

Selain itu, tambah Bayu, membuat agar para pelaku perdagangan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, melaksanakan kegiatan dan usahanya dengan baik, yaitu dengan transparan, akuntabel, berimbang dengan informasi yang terbuka.

Dimensi SRG

Menurut Bayu, banyak manfaat dari resi gudang yang didapatkan oleh para petani, dan produsen. Dan Kemendag memegang komitmen yang besar dalam hal membantu guna mendukung para petani. Tetapi sebenarnya resi gudang ini juga memiliki dimensi manfaat yang besar terhadap konsumen. Salah satunya yang diharapkan oleh konsumen adalah kepastian pasokan, stabilitas harga dari pasar.

“Tetapi akibat tidak cukupnya pasokan karena kelangkaan produksi maka terjadilah spekulasi,” tegasnya.

Lalu, spekulasi ini menjadi berarti didukung dua faktor. Yang pertama, ketidaksempurnaan informasi atau informasi yang tertutup dan tidak jelas. Kedua, adanya ketidakpercayaan atas kemampuan kita untuk melakukan susuatu, seperti menjamin ketersediaan pasokan.

“Jadi, SRG ini menjawab langsung dua-duanya. Dengan adanya resi gudang maka harga yang terbentuk dapat diketahui oleh semua orang dan semua pihak. Sehingga harga lebih transparan dan kualitas menjadi lebih terjamin,” ujar Bayu.

Ditambahkan Bayu, resi gudang memiliki dimensi yang baik terhadap konsumen dalam rangka menghindari tingkat spekulasi. Dan, dengan resi gudang kita bisa tahu persis berapa jumlah stok, di mana posisinya, serta jenisnya seperti apa.

“Ke depan, kita berharap SRG dapat juga dijadikan sebagai network pergudangan pangan. Sehingga kita bisa mengetahui di mana ketersedian pangan kelebihan pasokan dan di daerah mana terdapat kekurangan pasokan. Di dunia saat ini, komoditi pangan menjadi hal yang sangat diperhatikan. Jadi informasi pangan itu sangat kita perlukan, dan jika kita sudah punya network terhadap itu, maka kita nanti bisa melakukan tukar menukar informasi dan sesuatu yang riil tentang stok dan harga pangan,” papar Bayu.

Berkaitan dengan itu, Bayu Krisnamurthi, juga berpesan kepada Bappebti agar SRG tidak hanya dikembangkan untuk komoditi pangan. Tetapi juga bisa dikembangkan untuk komoditi ekspor lainnya seperti komoditi kopi, kakao, rumput laut, rotan dan lainnya.

“Jadi, kunci keberhasilan SRG itu adalah transparansi dan menjadi alternatif menyeimbangkan kepentingan konsumen dan produsen,” tegas Bayu Krisnamurthi. ▲



Efektifitas SRG Minimal 10 % Dari Produksi

Peran pemerintah mengontrol pergerakan harga komoditi pangan dengan skema Sistem Resi Gudang (SRG), akan efektif jika komoditi pangan yang tersimpan di gudang SRG berkisar 8 hingga 10 persen dari jumlah produksi. Dengan demikian, di sisi lain SRG akan berdampak langsung kepada petani yang menyimpan hasil produksinya di gudang SRG.

Menurut Wamendag, Bayu Krisnamurthi, di sela-sela kunjungan gudang SRG milik PT Pertani (Persero) di Haurgeulis, Indramayu, Jabar, pada 28 Januari 2012, dikatakan, SRG akan berdampak langsung kepada petani Indramayu bila hasil produksi tersimpan di gudang SRG sekitar 100 ribu hingga 150 ribu ton.

"Jika produksi gabah kering di Indramayu mencapai 1,5 juta ton per tahun, seharusnya ada sebanyak 100 ribu hingga 150 ribu ton gabah tersimpan di gudang. Tetapi saat ini, Indramayu baru memiliki dua gudang berkapasitas total 7.500 ton atau masih jauh dari ideal," jelas Bayu.

Karena itu, ditambahkan Wamendag ini, penerapan SRG yang efektif masih memerlukan waktu yang panjang, seiring telah direvisinya UU tentang SRG oleh DPR akhir tahun lalu, mulai awal tahun 2006 dan dia mendemen menjadi UU No.9/2011.

"SRG yang bagus akan berdampak positif untuk sistem perdagangan dan konsumen, sehingga bisa tahu stok nilai yang ada dan bisa memantau pergerakan harga. Dalam tahap ini, para spekulan akan semakin sulit bergerak," beber Bayu Krisnamurthi.

Modernisasi Logistik

Kepala Bappebi, Syahrul R. Sempurnajaya, dalam kesempatan itu juga mengutarakan, SRG merupakan modernisasi pada bidang distribusi dan perdagangan komoditas. Sistem ini sangat penting diciptakan, selain untuk gabah, bisa untuk komoditas lain seperti jagung, kopi, dan rumput laut.

"SRG sudah diberlakukan oleh banyak negara maju, antara lain Amerika Serikat dan Bulgaria. Namun perbedaannya, petani di sana memiliki modal besar sehingga memiliki daya tawar yang kuat dengan lembaga SRG," jelas Syahrul.

Lebih jauh diutarakan Syahrul R. Sempurnajaya, Menteri Perdagangan sudah mengeluarkan kebijakan untuk memasukan rotan dalam skema SRG. Namun diakui Syahrul, Bappebi saat ini masih mendata spesifikasi rotan yang diperlukan industri di Indonesia.

"Hal itu penting dilakukan untuk mengatur pasar rotan di dalam negeri setelah pemerintah melarang ekspor bahan baku rotan sejak 1 Januari 2012. Bappebi masih dalam menetapkan, jenis apa saja yang dipakai industri rotan dalam negeri. Karena, rotan yang bisa digunakan industri tidak hanya 4 atau 6 jenis saja. Tetapi ada sebanyak 16 jenis rotan yang ada selama ini beredar di pasar," kata Syahrul R. Sempurnajaya.

Di pihak lain, Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), selaku Pusat Registrasi SRG, Surdiyanto Suryodarmojo, mengatakan, salah satu kunci keberhasilan jaringan pergudangan komoditi pangan sangat ditentukan piranti lunak SRG. Piranti tersebut terhubung ke lembaga pembiayaan yang ditunjuk untuk memberikan kredit bagi

para petani atau pelaku SRG.

"Dengan piranti lunak itu bank tak perlu melakukan pengecekan secara fisik, dan pihak pengelola resi gudang akan bertanggung jawab akan data-data yang diterbitkan," jelas Surdiyanto.

"Jadi, bank yang membiayai SRG diberikan piranti lunak dan juga sarana pengamanan. Dengan fasilitas online, dalam hitungan detik atau menit bank bisa mendapatkan verifikasi atau konfirmasi bahwa pemiliknya benar dan resi gudangnya belum jatuh tempo," kata Surdiyanto.

Dengan demikian, kata Surdiyanto Suryodarmojo, perbankan bisa melakukan proses kredit dengan lebih cepat, dan dengan adanya konfirmasi dan verifikasi tersebut, bisa mengeluarkan pinjaman bagi petani di hari yang sama.

Sebagai ilustrasi, pemerintah melalui Bappebi sejak tahun 2009 telah membangun gudang SRG sebanyak 66 unit gudang di 60 kabupaten-kota. Masing-masing, tahun 2009 berdiri 41 gudang SRG di 35 kabupaten melalui dana stimulus fiskal. Tahun 2010, dibangun 11 gudang SRG di 11 kabupaten-kota dengan dana APBN-P 2010. Dan ditahun 2011, melalui dana alokasi khusus (DAK) dibangun 15 unit gudang SRG di 15 kabupaten.▲

Kelembagaan Sistem Resi Gudang 2011

- Gudang	: 42 persetujuan
- Pengelola Gudang	: 6 persetujuan
- LPK Inspeksi Gudang	: 3 persetujuan
- LPK Manajemen Mutu	: 1 persetujuan
- LPK Uji Mutu Komoditi	: 13 persetujuan
- Pusat Registrasi	: 1 persetujuan



Calon pembeli di Inatin melakukan simulasi pasar fisik timah.

Inatin Naikan Posisi Tawar Indonesia

Menjadi produsen utama timah dunia selama puluhan tahun, Indonesia saatnya menentukan harga timah dunia melalui Inatin.

Indonesia sebagai produsen utama timah dunia sejatinya dapat meningkatkan harga jual karena kualitas timah yang dihasilkan jauh lebih baik dari negara produsen lainnya. Salah satu upaya meningkatkan harga jual timah Indonesia adalah melalui pasar fisik timah. Ekspor timah hanya bisa dilakukan jika timah diperoleh dari pasar fisik timah.

Selain meningkatkan harga jual, dengan adanya pasar fisik timah akan mengurangi perdagangan dari tambang-tambang ilegal dan terjadinya keseimbangan antara pasokan dan permintaan.

“Jika kita memiliki pasar timah di dalam negeri, bisa dipastikan Indonesia bisa menentukan harga timah dunia,” demikian antara lain diungkapkan Dirut PT Timah (Persero), Wachid Usman, dalam Public Ekspos Inatin, di Jakarta, 12 Januari 2012.

Publik ekspos Inatin tersebut dihadiri sejumlah buyers timah baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, juga hadir Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Syahrul R. Sempurnajaya, Direksi Bursa komoditi dan derivatif Indonesia (BKDI), dan Managing Director Interna-

tional Tin Research Institute (ITRI), David Bishop.

Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, dalam sambutannya mengatakan, kehadiran Inatin ditujukan antara lain menaikkan posisi tawar Indonesia di pasar timah global.

“Selain itu sudah saatnya kita memperlihatkan dan membuktikan ke mata dunia bahwa Indonesia memiliki pasar fisik timah yang kredibel. Sehingga produsen timah di dalam negeri tidak saja mengacu harga ke luar negeri,” papar Syahrul.

Di samping itu, Syahrul R. Sempurnajaya, mengatakan, public ekspos Inatin menghadirkan sejumlah perwakilan pembeli industri baik Jepang maupun Korea. “Dengan kehadiran perwakilan pembeli ini telah menunjukkan minat bergabung, tapi mereka membutuhkan lebih banyak waktu lagi untuk mendapatkan persetujuan dari kantor pusat mereka.”

Lebih jauh diutarakan Wachid Usman, dengan keberadaan Inatin kelak diharapkan pemerintah memberi dukungan berupa kebijakan ekspor satu pintu. Dimaksudkan, Wachid Usman, kebijakan ekspor timah hanya bisa dilakukan dari hasil transaksi pasar fisik

Inatin.

“Jika ada kebijakan seperti itu pasar timah di dalam negeri akan tertata. Dan tidak ada lagi penambang ilegal, karena timah yang diekspor harus bersertifikasi SNI,” jelas Wachid.

Kebijakan ini pun akan berdampak pada pelestarian lingkungan hidup dan pembatasan eksploitasi timah yang berlebihan.

“Ketika harga timah dunia relatif baik, maka di sentra produksi Bangka Belitung, akan bermunculan penambang liar. Dan ketika harga cenderung turun, bekas penambangan itu ditinggalkan begitu saja tanpa di-

“Meski suplai timah dari Indonesia berkurang dan ditutupi dari beberapa negara penghasil timah, namun kualitasnya lebih rendah dibandingkan produk dari Indonesia...”

David Bishop



rehabilitasi. Tentunya jika ini dibiarkan terus menerus akan berdampak pada kerusahan lingkungan hidup," tegas Wachid.

Penting juga diketahui, tambah Wachid Usman, posisi Indonesia saat ini merupakan eksportir timah terbesar di dunia. Tetapi disisi lain deposit timah yang ada di perut bumi menempati urutan keempat.

"Jadi harus ada pembatasan. Kalau terlalu dieksplorasi lama-kelamaan deposit itu akan habis dan kelak Indonesia akan menjadi importir timah," papar Wachid.

Diprediksi Naik

David Bishop, dalam presentasinya disaat yang sama mengatakan, harga timah dunia diprediksi akan kembali menyentuh level US\$ 25 ribu per ton pada semester II tahun 2012. Hal ini dipicu penurunan pasokan, terutama dari Indonesia, sementara tingkat permintaan diperkirakan tetap tumbuh.

"Meski suplai timah dari Indonesia berkangur dan ditutupi dari beberapa negara penghasil timah, namun kualitasnya lebih rendah dibandingkan produk dari Indonesia. Suplai itu diantaranya berasal Bolivia, Afrika, Australia, dan Brasil," kata David.

Menurut data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor timah Indonesia sepanjang 2011 mencapai US\$ 2,37 miliar, atau naik 38 % dibandingkan 2010 sebesar US\$ 1,71 miliar. Sedangkan volume ekspor timah pada 2011 mencapai 95.969 ton atau naik 3,7 % dibandingkan tahun 2010 sebesar 92.486 ton.

Mengacu pada data timah tersebut, harga

jual rata-rata timah Indonesia tahun 2011 berkisar US\$ 24.695 per ton. Atau ada naik sekitar 33,5 % dibandingkan 2010 sekitar US\$ 18.489 per ton. Sedangkan harga rata-rata timah di bursa berjangka London Metal Exchange (LME) sepanjang 2011 tercatat US\$ 25.956 per ton, lebih tinggi 27 % dibandingkan tahun 2012 yang berada dikisaran US\$ 20.408 per ton.

PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), akan melakukan transaksi perdana timah pada 1 Februari 2012 mendatang.

Di pihak lain, Dirut BKDI, Megain Widjaja, mengatakan, dalam penyelenggaraan pasar fisik timah Inatin sudah ada dua perusahaan yang menjadi penjual. Yakni, PT Timah dan PT Tambang Timah.

"Pastinya BKDI akan mengumumkan siapa saja pihak-pihak baik sebagai seller maupun buyer"

Menurut Megain, perusahaan yang berniat bergabung di Inatin harus memperoleh persetujuan dari Komite Timah Indonesia (KTI). Hal itu dikarenakan KTI berperan dalam menentukan peraturan dan tata tertib Inatin.

Kontrak timah yang diberi kode Inatin ini adalah kontrak yang diperdagangkan berbasis dolar AS (USS) dan satu lot kontrak setara dengan lima metrik ton (MT), dengan kelipatan USS 5 per ton. Perdagangan Inatin akan dilaksanakan secara lelang terbuka hanya melalui satu sesi perdagangan selama 15 menit mulai pukul 14.30 hingga 14.45 WIB.

"Satu menit setelah 15 menit lelang terbuka berlangsung, harga penutupan transaksi akan diumumkan dan menjadi harga penyelesaian untuk transaksi pada hari itu juga," jelas Megain.

Dalam kaitan itu, tambah Megain, BKDI telah menjalin kerja sama strategis dengan PT Banda Ghara Reksa (BGR). Dalam kerjasama itu, BGR bertindak selaku gudang penyimpan timah. "Kerja sama ini merupakan salah satu kunci keberhasilan Inatin. Karena BGR memiliki peran penting sebagai tempat penyelesaian penyerahan fisik Inatin. BGR juga bekerja sama dengan penguji mutu independen untuk memastikan kualitas timah yang nanti diserahkan dapat sesuai dengan spesifikasi kontrak yang sudah diterbitkan oleh BKDI dan KTI," papar Megain.

Lebih jauh disampaikan Megain Widjaja, diharapkan perdagangan perdanan Inatin yang akan diselenggarakan pada 1 Februari 2012, mendatang akan lebih banyak perkembangan baik dari sisi pembeli maupun penjual. Karena, semakin banyak pihak pembeli yang menawarkan kontrak harga, maka pasar timah akan lebih semarak di dalam negeri. Dan harga yang tercipta saat itu akan menjadi acuan pasar global.

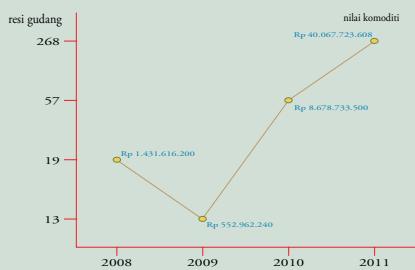
Pembentukan pasar fisik timah di Indonesia merupakan langkah strategis, mengingat Indonesia adalah pengekspor timah terbesar di dunia. Namun fakta berbicara lain. Indonesia tidak berdaya menghadapi ulah para spekulan yang kerap mempermainkan harga. ▲



Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappetebi, Sutriono Edi

“Peran swasta dan koperasi yang memiliki bisnis gudang sangat diharapkan untuk pengembangan SRG”

Perkembangan Resi Gudang



Survey & Pemetaan Gudang Antisipasi Lonjakan Pembiayaan SRG

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappetebi) tahun 2012 direncanakan melakukan pemetaan gudang baik milik pemerintah maupun milik swasta dan koperasi. Pemetaan gudang tersebut ditujukan untuk memaksimalkan implementasi skema pembiayaan pasca panen Sistem Resi Gudang (SRG). Program ini mendesak dilakukan karena perkembangan SRG disejumlah daerah sudah semakin pesat.

Demikian antara lain diutarakan Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Sutriono Edi, baru-baru ini.

“Perkembangan pembiayaan SRG dari tahun 2010 ke tahun 2011 mencapai 370 %. Itu tandanya SRG semakin meluas di masyarakat,” jelas Sutriono.

Siring dengan perkembangan tersebut, tambahnya, Bappetebi selaku lembaga pembina dan pengawasan SRG berdasarkan Undang-undang No. 9/2006, dan perubahannya No. 9/2011, harus memikirkan penambahan gudang guna mengantisipasi lonjakan pembiayaan.

“Pemerintah tidak memiliki kemampuan pendanaan besar untuk membangun gudang yang lebih banyak. Meski setiap tahun di-

sejumlah daerah akan dibangun gudang SRG. Seperti tahun 2012, sudah direncanakan pembangunan gudang sebanyak 15 unit di 15 kabupaten,” kata Sutriono.

Oleh karena itu, tambah Sutriono lebih jauh, peran swasta dan koperasi yang memiliki bisnis gudang sangat diharapkan untuk pengembangan SRG ini. “Yang menjadi persoalan, kita- Indonesia tidak memiliki data base perusahaan pergudangan.”

“Kami- Bappetebi sudah menemui sejumlah perusahaan pergudangan untuk mencari data base tersebut. Tetapi hasilnya tidak memuaskan. Makanya di tahun 2012 Bappetebi akan melakukan pendataan dan survey gudang yang layak dijadikan penyimpanan komoditi dalam skema SRG,” papar Sutriono.

“Di Indonesia sampai saat ini belum ada asosiasi pergudangan. Lain halnya seperti di Amerika, mereka sudah memiliki asosiasi. Sehingga dengan mudah mengetahui berapa banyak jumlah gudang, kapasitasnya dan jenis komoditi yang bisa disimpan di gudang tersebut,” katanya.

Kebijakan pemerintah membangun gudang SRG disejumlah daerah pada dasarnya untuk mempermudah pelaku usaha, petani, perbankan dan lembaga terkait dalam mengimplementasikan pembiayaan pasca



REKAPITULASI RESI GUDANG
Tahun 2011

NO	PENGELOLA GUDANG / GUDANG	PENERBITAN				PEMBIAYAAN		
		Jumlah Resi Gudang	Komoditi	Jumlah Komoditi (Ton)	Nilai Barang	Jumlah Resi Gudang	Bank/LKNB	Nilai
I. PT Pertani								
1	Gudang Indramayu	27	Gabah	673,35	Rp 2.934.930.000	22	BRI, Bank BJB, PKBL KBI	Rp 1.729.933.500
		14	Beras	268,6	Rp 2.247.100.000	10	Bank BJB	Rp 1.096.970.000
2	Gudang Banyuwangi	5	Gabah	362,36	Rp 1.459.350.000	5	PKBL KBI, Bank Jatim	Rp 706.545.000
3	Gudang Sidrap	7	Gabah	1214,08	Rp 4.546.906.000	7	LPDB KUKM, BRI	Rp 3.182.834.200
		5	Beras	305,25	Rp 1.903.475.000	5	Bank BRI	Rp 1.332.432.500
4	Gudang Pinrang	1	Gabah	147	Rp 632.100.000	1	Bank BRI	Rp 442.470.000
5	Gudang Subang	46	Gabah	1084,7	Rp 4.910.912.500	45	Bank BJB	Rp 3.327.216.250
		13	Beras	252,4	Rp 2.091.650.000	12	Bank BJB	Rp 1.416.880.000
6	Gudang Jepara	5	Gabah	27,95	Rp 105.230.000	4	PKBL KBI	Rp 59.024.000
7	Gudang Probolinggo	15	Gabah	492	Rp 1.688.700.000	12	Bank Jatim	Rp 589.000.000
8	Gudang Bantul	5	Gabah	86,75	Rp 302.465.000	2	PKBL KBI, BRI	Rp 39.168.500
9	Gudang Mojokerto 1	11	Gabah	1035,09	Rp 4.266.605.000	11	LPDB KUKM	Rp 2.986.623.500
10	Gudang Mojokerto 2	-	-	-	-	-	-	-
11	Gudang Kudus	1	Gabah	19	Rp 62.700.000	-	-	Rp -
12	Gudang Jombang	7	Gabah	545,5	Rp 2.576.750.000	5	LPDB KUKM, Bank Jatim	Rp 1.454.075.000
13	Gudang Nganjuk	19	Gabah	556,82	Rp 2.336.592.500	17	Bank Jatim	Rp 1.459.739.750
		0	Jagung	0	Rp -	0	-	Rp -
14	Gudang Cianjur	17	Gabah	261	Rp 1.530.732.000	16	Bank BJB	Rp 1.017.520.000
15	Gudang Sragen	-	-	-	-	-	-	-
16	Gudang Jombang Perak	3	Gabah	185,55	Rp 803.400.000	3	Bank Jatim	Rp 562.380.000
17	Gudang Banyuwangi Cluring	7	Gabah	412,7	Rp 1.667.450.000	5	Bank Jatim	Rp 796.775.000
18	Gudang Indramayu Losarang	8	Gabah	162,75	Rp 721.000.000	8	Bank BJB	Rp 503.000.000
19	Gudang Tulungagung	4	Gabah	68,8	Rp 275.200.000	3	Bank Jatim	Rp 122.640.000
		1	Jagung	18,6	Rp 46.500.000	1	Bank Jatim	Rp 32.550.000
20	Gudang Madiun - Muneng	10	Gabah	115,458	Rp 534.550.000	5	Bank Jatim	Rp 203.472.500
		1	Beras	6	Rp 42.000.000	-	-	Rp -
21	Gudang Pasuruan	3	Gabah	67,5	Rp 326.250.000	-	-	Rp -
22	Gudang Ngawi	2	Gabah	16,613	Rp 74.758.500	1	Bank Jatim	Rp 26.362.350
23	Gudang Lombok Timur	3	Jagung	226,5	Rp 550.175.000	-	-	-
II. PT Banda Ghara Reksa								
1	Gudang Madiun	1	Gabah	20	Rp 60.000.000	-	-	Rp -
2	Gudang Barito Kuala	26	Gabah	262,399	Rp 1.321.473.000	11	Bank Kalsel	Rp 434.800.000
III. Sucofindo								
1	Gudang Takengon	4	Kopi	0,89933	Rp 48.769.108	3	BRI	Rp 18.809.980
	Jumlah	230	Gabah	7.817,37	Rp 33.138.054.500	183		Rp 19.643.579.550
		4	Jagung	245,10	Rp 596.675.000	1		Rp 32.550.000
		33	Beras	832,25	Rp 6.284.225.000	27		Rp 3.846.282.500
		4	Kopi	0,90	Rp 48.769.108	3		Rp 18.809.980
	TOTAL	271		8.895,62	Rp 40.067.723.608	214		Rp 23.541.222.030

Keterangan :

: Gudang Stimulus Fiskal Kemendag TA 2009

6 Februari 2012

BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI

panen ini. Sejatinya pihak swasta, BUMN dan koperasi yang mengembangkan bisnis pergudangan SRG.

"Pihak swasta atau siapa pun dia, tidak akan mungkin mau mengembangkan SRG. Karena mereka beranggapan bisnis ini belum menguntungkan. Tetapi kalau SRG ini sudah berkembang pesat, kami yakin bisnis pergudangan akan menjanjikan keuntungan. Makanya BappebtI perlu data base pergudangan itu, sehingga bisa dilakukan pendekatan dan mengenalkan SRG ini," jelas Sutriono Edi.

Sesuai dengan Undang-undang No. 9/2011, pergudangan yang layak menjadi tempat penyimpanan komoditi antara lain

gudang tersebut memiliki sertifikasi SNI, memiliki SDM pergudangan, memiliki SOP dan telah mendapatkan ISO.

"Selain persyaratan sesuai undang-undang, tentunya BappebtI akan mengkaji dari sisi permodalan dan moral hazard pengelolaannya. Memang tidak mudah untuk mendapatkan izin pergudangan SRG, tetapi dapat kami pastikan akan ada fleksibilitas dari BappebtI. Karena kami ketahui gudang yang memenuhi persyaratan tidak banyak ditemukan di Indonesia," tutur Sutriono.

Koperasi pemilik gudang mungkin kesulitan memenuhi persyaratan dari sisi permodalan, tetapi oleh pihak Pengelola Gudang bisa menjamin gudang tersebut bisa diguna-

kan maka BappebtI akan memberi izin kepada koperasi tersebut. "Mungkin dari sisi itu lah fleksibilitas yang bisa diberikan BappebtI," kata Sutriono.

"Persyaratan gudang sesuai undang-undang itu sangat penting diketahui perbankan. Karena kalau mereka ragu dengan gudang tersebut, bank pasti tidak akan mau memberi pembiayaan. Itu benteng pertama perbankan memasuki bisnis SRG," terang Sutriono.

"Jadi, target kami tahun 2012 ini, data base gudang tersebut sudah bisa didapatkan. Sehingga di tahun 2013 bisa dipetakan gudang swasta atau koperasi mana yang digunakan untuk pengembangan SRG," tandas Sutriono Edi. ▲



Transaksi ternak sapi di Puspa Agro mencapai Rp 8,5 miliar, atau 34 % dari total transaksi.

Lelang Puspa Agro Naik 59 %

Pasar Induk Puspa Agro Jemundo, Jawa Timur, pada 31 Januari 2012 untuk pertama kali menyelenggarakan pasar lelang di tahun 2012, ini. Dari penyelenggaraan pasar lelang ke 89 itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur menyertakan sejumlah komoditi pertanian. Diantaranya komoditi beras, jagung, gula pasir, kedelai, kacang hijau, sayur mayur seperti kentang, wortel, cabe, kubis, bawang merah, bawang putih dan ternak sapi potong.

Hingga akhir penyelenggaraan pasar lelang Puspa Agro, nilai transaksi para peserta dicatat sebesar Rp 25,243 miliar. Nilai perdagangan itu didominasi ternak sapi potong dengan nilai Rp 8,5 miliar atau sekitar 34 persen, sedangkan sisanya meliputi komoditi pangan.

Nilai transaksi pasar lelang ke 89 itu meningkat sekitar 59 persen dibandingkan dari nilai transaksi pasar lelang periode ke 88 yang diselenggarakan pada 27 Desember 2011. Saat itu transaksi pasar lelang Puspa Agro mencapai Rp 15,072 miliar.

Kepala Disperindag, Jatim, Budi Setiawan, kepada wartawan mengatakan, penyelenggaraan pasar lelang Puspa Agro tersebut cukup membantu para pedagang dari berbagai daerah untuk mencari komoditi yang akan diperdagangkan. Hal itu dibuktikan dengan hadirnya sejumlah pedagang dari Jakarta, Bandung dan Bali.

“Dengan nilai transaksi pasar lelang yang

terus meningkat itu, tentunya akan menambah semangat kami untuk menfasilitasi para petani bertransaksi langsung dengan pedagang. Karena pada dasarnya itulah tujuan dan manfaat penyelenggaraan pasar lelang,” jelas Budi Setiawan

Lebih jauh diutarakan Budi Setiawan, hingga penyelenggaraan pasar lelang ke 89 itu, harga sejumlah komoditi pangan masih cukup bagus. Terbukti hingga saat ini untuk harga cabe rawit di pasar tradisional Surabaya masih berkisar Rp 10.000/kg dan cabe merah keriting dan biasa Rp 18.000/kg serta tomat Rp 12.000/kg.

Selain tomat dan cabe makanan pokok beras juga masih menjadi incaran para pedagang besar khususnya dari Jakarta dan Bandung. Karena makanan pokok beras sampai saat ini harganya masih cukup tinggi. Untuk beras medium IR 64 berkisar Rp 7.600-Rp 8.000/kg dan beras kualitas baik sekelas pandan wangi mentik masih Rp 9.500-Rp 9.700/kg.

Kemudian komoditi buah-buahan seperti melon, semangka, apukan, jeruk, pisang, apel, buah, rambutan, pisang, pier, duku dan buah naga akan banyak dicari oleh para distributor Pasar Induk Jakarta.

“Selain itu, kami juga menyertakan sejumlah komoditi rempah-rempah seperti jahe, kunir, kencur, temu ireng, lada, pala, kayu manis, dan cabe jamu. Di pasar lelang ini juga dipasarkan komoditi bunga, aneka kerupuk, jamu tradisional, bumbu masak, ikan air tawar, telur, gula merah dan berbagai

kerajinan dari daerah di Jatim,” jelas Budi Setiawan.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Disperindag, Jatim, Arifien T Hariadi, mengatakan, dalam penyelenggaraan pasar lelang Puspa Agro periode ke 88 pada 27 Desember 2011, dibanjiri pembeli dari berbagai daerah. “Selama sekitar lima jam penyelenggaraan pasar lelang, nilai transaksi mencapai Rp 15,072 miliar.”

Menurut Hariadi, nilai transaksi itu dicatatkan dari perdagangan beras dari berbagai varietas dengan volume 925 ton dan mencapai nilai Rp 7,345 miliar. Transaksi beras itu menyedot 48,73 persen dari total nilai transaksi. Lalu disusul komoditi gula pasir lokal dengan volume 150 ton dengan nilai transaksi Rp 1,260 miliar atau 8,36 persen. Komoditi kentang granola dari Malang dengan volume 360 ton senilai Rp 1,080 miliar, tomat 100 ton senilai Rp 950 juta, telur ayam ras 30 ton Rp 427 juta, dan telur ayam ras 5.280 ikat Rp 865 juta.

“Sejumlah komoditi yang mencatatkan nilai terbesar dan terbaik itu, umumnya dikuasai para pedagang yang datang dari Jakarta. Hal ini juga menunjukkan bahwa pasar komoditi yang dihasilkan petani Jawa Timur, diserap dan dikonsumsi Jakarta,” terang Arifien T. Hariadi. ▲



PLKA Mataram Naik Peringkat

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Nusa Tenggara Barat (NTB), sepanjang tahun 2011 mencatat nilai transaksi pasar lelang komoditi agro (PLKA) mencapai Rp 29,89 miliar. Nilai transaksi tersebut termasuk kegiatan pasar lelang komoditi agro yang digelar di Kabupaten Lombok Utara senilai 2,35 miliar.

Penyelenggaraan PLKA Mataram selama periode 2011, diadakan sebanyak tujuh kali

penyelenggaraan. Sedangkan periode sebelumnya hanya dilaksanakan sebanyak empat kali.

Penyelenggaraan pasar lelang di NTB menurut Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Disperindag, NTB, Ulayati Ali, merupakan salah satu langkah terobosan yang diprogramkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

"Tujuan diselenggarakan pasar lelang ini untuk mewujudkan sistem perdagangan yang lebih baik melalui transparansi dan mekanisme penentuan harga, serta memotong mata rantai pemasaran agar lebih efisien," jelas Ulayati.

Oleh karena itu para pedagang dari berbagai daerah senantiasa diundang untuk menghadiri penyelenggaraan pasar lelang Mataram, tambah Ulayati.

"Manfaat pasar lelang ini cukup banyak, antara lain meningkatnya efisiensi pemasaran,

meningkatkan posisi tawar petani menjadi lebih baik dan mendorong peningkatan mutu produksi serta adanya kepastian pasar," papar Ulayati.

Selain itu dikatakan Ulayati, melalui kegiatan pasar lelang komoditi agro para petani bisa lebih mudah berinteraksi dengan pengusaha di bidang agribisnis dalam memasarkan hasil pertaniannya.

"Dari pertemuan itu para petani juga bisa membentuk jaringan pemasaran yang lebih efisien."

Menurut Ulayati, pemerintah pusat melalui Bappebti memberikan penilaian positif terhadap kegiatan pasar lelang komoditi agro yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi NTB, dengan memberikan peringkat ke sembilan dari seluruh provinsi penyelenggara pasar lelang.

"Penilaian yang cukup bagus tersebut diberikan karena jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah pelajai-usaha dan petani, keragaman komoditas dan pelaksanaan kegiatan yang cukup bagus," ujar Ulayati Ali.

Ke depan kinerja pasar lelang NTB ini tentunya akan ditingkatkan, tambahnya. Sehingga bisa memberi nilai tambah baik bagi petani maupun pemerintah daerah.

Lebih jauh diutarakan Ulayati, komoditas yang dilelang sebagian besar adalah hasil pertanian dan perkebunan seperti biji cokelat, kopi, biji mete, jagung serta ternak sapi. Sedangkan para peserta pasar lelang yang melakukan transaksi berasal dari NTB dan beberapa provinsi seperti Bali, Jawa Tengah

dan Jawa Timur.

"Pemerintah Daerah memandang keberadaan pasar lelang ini merupakan sarana peningkatan pendapatan daerah dari perdagangan komoditi lokal. Jadi bisa dikatakan, pasar lelang merupakan etalase dari daerah dalam memasarkan komoditi yang dihasilkan petani," jabar Ulayati.

Oleh karena itu, tambah Ulayati, kita senantiasa berharap para petani NTB bisa menghasilkan komoditi dengan kualitas terbaik. Dengan kualitas yang terbaik tentunya juga akan meningkatkan pendapatan petani. ▲

“pemerintah pusat melalui Bappebti memberikan penilaian positif terhadap kegiatan pasar lelang komoditi agro yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi NTB, dengan memberikan peringkat ke sembilan dari seluruh provinsi penyelenggara pasar lelang.**”**

Ulayati Ali



Sukses SRG Lewat GP3K

Direktur Utama PT Pertani (Persero), Dwi Ananto

“ Kalau dalam satu musim petani diberi pambiayaan SRG sekitar Rp 2,5 juta, maka PT Pertani sudah mengelola gudang sekitar Rp 1 triliun. ”

Kementerian BUMN di tahun 2011, lalu, menggulirkan dana sebesar Rp 1 trilun kepada sebanyak 28 perusahaan BUMN di bidang pangan. Dana itu ditujukan untuk meningkatkan produksi padi di dalam negeri. Program meningkatkan produksi padi itu disebut Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Untuk meningkatkan produksi padi di dalam negeri dengan program GP3K itu, ditargetkan ada seluas 1 juta hektar tanaman padi.

Salah satu perusahaan BUMN yang memiliki peran penting dalam GP3K itu adalah PT Pertani (Persero). Berkaitan dengan itu, PT Pertani menjalankan dua fungsi sekaligus. Yakni, pertama, menyediakan bibit padi yang akan ditanam para petani binaan. Kedua, menampung gabah hasil panen masuk dalam mekanisme pembiayaan Sistem Resi Gudang (SRG).

Untuk mengetahui peran dan strategi PT Pertani dalam program GP3K tersebut,

Buletin Kontrak Berjangka secara khusus mewawancara Direktur Utama PT Pertani (Persero), Dwi Ananto, saat kunjungan Wamendag, Bayu Krisnamurthi, ke gudang PT Pertani di Haurgeulis, Indramayu, Jabar, 28 Januari 2012. Berikut ini petikannya;

Tanya (T). Dalam percepatan implementasi pembiayaan pasca panen dengan instrumen SRG dan dikaitkan dengan program ketahanan pangan di dalam negeri, apa saja yang dilakukan PT Pertani?

Jawab (J). Instrumen pembiayaan pasca panen ini tidak mungkin bisa berjalan jika diserahkan pada mekanisme pasar. Dan, program ketahanan pangan dengan ketersediaan gabah atau beras di dalam negeri yang direncanakan pemerintah pun tidak akan berjalan. Oleh karena itu harus ada program pendukung yang terintegrasi mulai dari hilir hingga hulu. Jadi, untuk tugas dan tanggungjawab yang demikian besar itu, hanya bisa dijalankan oleh perusahaan berbasis BUMN. Karena visi dan misinya jelas untuk kesejahteraan rakyat.



Pekerja PT. Pertani memisahkan beras premium untuk konsumsi restoran fast food.

(T). Konkritnya seperti apa program itu pak?

(J). Dalam program GP3K itu, ada sebanyak 28 perusahaan BUMN dari sektor pangan menjalin kemitraan. Misalnya, PT Pertani dan PT Shang Hyang Sri, bertindak menyediakan bibit. Sedangkan PT Pusri menyediakan pupuk. Lalu, setelah gabah dipanen akan dimasukan dalam skema SRG. ‘Nah, disiniah peran PT Pertani, sebagai salah satu perusahaan perdagangan yang telah memiliki izin pengelola gudang. Dengan dimasukan gabah ke dalam skema SRG, petani tidak perlu khawatir harga gabah disaat panen rendah. Karena, petani bisa memperoleh pembiayaan murah dari perbankan BUMN dengan jaminan gabah yang ada di gudang.

(T). Kapan program GP3K itu dilaksanakan?

(J). Sudah berjalan. Program itu sudah dilaksanakan sejak dicanangkan Meneg BUMN pada awal Agustus 2011, lalu. Bahkan sejumlah petani binaan sudah merasakan manfaatnya. Karena apa? Karena petani mendapatkan pelatihan sehingga bisa melakukan peningkatan mutu. Selain itu, kita pun menjamin pasar dari komoditi yang dihasilkan dengan skema SRG. Jadi, ketika harga rendah pun petani tidak perlu khawatir akan merugi. Komoditi yang dihasilkan bisa dimasukan ke dalam gudang dan petani bisa memperoleh pinjaman dari bank sejumlah 70 persen dari nilai komoditinya.

(T). Jika demikian PT Pertani membina petani di wilayah mana saja?

(J). Program GP3K ini akan kita jalankan di semua provinsi. Tetapi secara bertahap.

Tahun 2011 lalu program itu sudah dijalankan untuk seluas 200 ribu hektar. Tetapi hasil tanaman padi dari seluas 200 ribu hektar itu belum disentuh dengan skema pembiayaan SRG. Lalu, tahun 2012, ini, kami targetkan menjadi 400 ribu hektar. Rencana kami pada akhirnya untuk program ketahanan pangan GP3K ini akan mencapai 1 juta hektar tanaman padi.

(T). Apakah target 1 juta hektar itu termasuk membuka areal persawahan baru?

(J). Benul. Kami rencanakan akan membuka lahan persawahan baru di beberapa wilayah, seperti di Kalimantan dan Papua.

(T). Dengan 1 juta hektar tanaman padi, tentunya daya tampung gudang yang dibutuhkan pun akan lebih besar. Dan, saat ini ‘kan belum di semua daerah memiliki gudang SRG. Apa pendapat bapak?

(J). Justru karena itulah kami dari PT Pertani mau terlibat menggalakan SRG ini. Di sisi lain, kita harapkan gudang-gudang swasta pun bisa dijadikan tempat penyimpanan gabah. Saya mau menggambarkan, kalau ada 400 ribu hektar tanaman padi dengan rata-rata memproduksi gabah keling giling (GKG) 5 ton, maka akan ada 2 juta ton gabah dalam satu musim. Kalau kita pukul rata satu tahun ada dua musim, maka ada 4 juta ton gabah. Kalau dalam satu musim petani diberi pembiayaan SRG sekitar Rp 2,5 juta, maka PT Pertani sudah mengelola gudang sekitar Rp 1 triliun. Jadi, ke depan memang sangat dibutuhkan jumlah gudang yang banyak. Kalau hanya mengandalkan gudang yang dimiliki PT Pertani hanya mampu menampung sekitar 50 ribu ton.

(T). Saat ini PT Pertani sudah berapa banyak mengelola gudang SRG?

(J). Hingga akhir tahun 2011, sudah ada sebanyak 34 gudang SRG yang dikelola PT Pertani.

Dari gudang sebanyak itu, kira-kira jumlah komoditi sekitar 8.000 ton. Atau dengan dari sisi nilai komoditi sekitar Rp 50 miliar. Sedangkan pembiayaan resi gudang dari perbankan mencapai Rp 35 miliar. Kalau PT Pertani saat ini hanya memiliki 20 unit gudang dengan 18 unit penggilingan padi.

(T). Dengan keterlibatan sebagai pengelola gudang SRG, apakah PT Pertani sudah merubah core bisnisnya?

(J). Saya rasa tidak ada yang berubah dari core bisnis PT Pertani. Memperluas dan menambah tugas memang jelas ia. Kami akui memang selama ini kurang kreasi dalam mengembangkan bisnis pergudangan. Tetapi saat ini pun sejumlah unit gudang PT Pertani juga menyimpan komoditi beras, cokelat, karet, kopi. Ke depan kami juga merencanakan mengelola gudang untuk komoditi garam. Sudah ada pembicaraan kami dengan PN Garam. Dan, mereka pun sangat tertarik mengembangkan komoditi garam seperti mekanisme SRG. Saat ini petani garam masih sangat tradisional. Setelah panen mereka cenderung menjual dengan harga murah dan kualitasnya pun rendah. Jika petani garam dikenalkan dengan skema SRG, petani garam pasti akan termotivasi dan menghasilkan garam berkualitas baik. ▲



Agenda Foto



Upaya meningkatkan kinerja pegawai Bappebti dan Itjen Kemendag, Mendorong Gita Wirjawan didampingi Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya dan Inspektor Jenderal Kemendag, Eddy Suseno memberikan pengarahan kepada seluruh Pegawai Bappebti dan Inspektorat Jenderal yang dilakukan di Gedung Utama Kemendag. Jakarta, 10 Januari 2012.



Wamendag Bayu Krisnamurthi didampingi Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya, bersama sejumlah wartawan yang tergabung pada Forum Wartawan Kementerian Perdagangan (FORWARD) mengunjungi Gudang SRG yang dikelola oleh PT Pertani di Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Dalam kunjungan tersebut hadiri antara lain Anggota Komisi VI DPR Yusyus Kuswandana, Sekda Kabupaten Indramayu Cecep Nana Suryana, Dirut PT Pertani Dwi Antoni, Dirut PT KBI Surdiyanto Suryodarmojo. Indramayu 28 Januari 2012.



Narasumber diskusi FORWARD berfoto bersama dan kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya menyerahkan hadiah door-prize kepada salah satu wartawan anggota FORWARD. Indramayu 28 Januari 2012.

Agenda Foto



Kepala Bappebi Syahrul R. Sempurnajaya membuka Public Expose INATIN dalam Rangka Peluncuran Kontrak Fisik timah di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, acara dihadiri pula Pejabat Kementerian ESDM, Pejabat Kementerian BUMN, Direksi dan Komisaris PT. BKDI dan ISI, Ketua Asosiasi Timah Indonesia, dan Para Pelaku Usaha Pasar Timah. Jakarta, 12 Januari 2012.



Rapat antar Kementerian membahas dua RPP yakni tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Rapat pembahasan tentang Peraturan Pelaksanaan dari dua UU tersebut dihadiri Bappebi Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, dan para pelaku pasar. Jakarta, 12 – 13 Januari 2012.



Kepala Bappebi, Syahrul R Sempurnajaya didampingi Kepala Biro Hukum, Alfons Samosir melakukan kunjungan ke Perusahaan Pialang PT. Solid Gold Berjangka. Dan dihari yang sama Kepala Bappebi juga melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Bank Windu Kentjana International sebagai Bank pengimpor margin dalam kegiatan PBK. Jakarta, 31 Januari 2012.

Kemenkominfo & Bappebti Bakal Blokir Website Ilegal



Bappebti dalam waktu dekat akan menjalin kerjasama dengan Kemenkominfo dalam pengawasan perdagangan berjangka menggunakan teknologi informasi. Hal itu terkait dengan maraknya penawaran perdagangan berjangka diberbagai media online, yang tidak memenuhi ketentuan dan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Wujud kerjasama itu antara lain, memblokir website yang menawarkan transaksi perdagangan berjangka melalui media online. Tindakan itu ditujukan untuk melindungi masyarakat dari risiko investasi perdagangan berjangka yang tidak memenuhi peraturan dan perundang-undangan.

“Saat ini kami sedang menyusun konsep dan pola kerjasama yang akan dilakukan dengan Kemenkominfo. Diharapkan dalam waktu dekat kerjasama itu bisa diwujudkan untuk menghindari semakin banyak masyarakat yang jadi korban,” jelas Kepala Biro Hukum Bappebti,

Alfons Samosir.

Kami berharap sekitar bulan Februari 2012, kerjasama itu bisa direalisasikan. Karena pihak berwenang memblokir website atau iklan penawaran investasi perdagangan berjangka di media online, adalah Kemenkominfo, tambah Alfons.

Menurut Alfons Samosir, hanya tindakan itu yang bisa dilakukan Bappebti melindungi masyarakat dari risiko penawaran perdagangan berjangka dari media online.

“Berbagai perusahaan perdagangan berjangka yang menawarkan investasi online itu tidak jelas keberadaanya di mana. Sehingga jika terjadi risiko dipihak masyarakat sulit untuk menelusuri dan menindaknya,” jelas Alfons.

“Tetapi jika praktik rugikan itu berasal dari perusahaan pialang berjangka yang terdaftar dan memiliki izin usaha dari Bappebti, maka tindakannya jelas mengacu pada No. 32/1997 yang telah mengalami perubahan menjadi UU No. 10/2011, tentang perdagangan berjangka komoditi,” beber Alfons Samosir. ▲

JFX ‘Mimpi’ Go Public 2015

Undang-Undang No. 10/2011, tentang perdagangan berjangka komoditi, memberi peluang kepada bursa berjangka untuk melakukan demutualisasi. Dalam kaitan itu, Jakarta Futures Exchange (JFX) berkeinginan go public di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. Direktur JFX, Roy Sembel, kepada pers pada 10 Januari 2012, mengatakan, rencana JFX tersebut masih menunggu penerapan demutualisasi.

“Tahun ini kita adakan persiapan demutualisasi, tahun depan penerapan demutualisasi. Dalam tempo satu hingga dua tahun baru persiapan go public. Template-nya sekitar empat tahun ke depan, jadi tepatnya tahun 2015,” jelas Roy.

Di samping itu, kata Roy Sembel, bursa masih menunggu dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dari UU No. 10/2011.

Menurut Roy, demutualisasi bursa dilakukan sebagai upaya mengubah struktur kepemilikan bursa yang terbatas pada anggota bursa. “Dengan kata lain, saham JFX dapat dimiliki masyarakat umum. Dengan perubahan struktur itu, bursa berjangka akan berorientasi profit untuk tujuan pengembangan bursa.”

Sementara itu, menurut Roy Sembel, JFX di tahun 2012 ini mencanangkan sebagai tahun investasi dan inovasi meraih prestasi, sebanding pada tahun 2011 sebagai tahun berbenah meraih prestasi. Dalam kaitan itu, JFX berencana mengembangkan sistem teknologi perdagangan on-line yang sesuai dengan standar internasional. Dengan teknologi terbaru

itu diharapkan peningkatan likuiditas transaksi kontrak multilateral.

“Untuk meningkatkan volume transaksi kontrak multilateral, kami pun di tahun 2012 ini akan meluncurkan sejumlah kontrak berjangka baru. Misalnya, kontrak berjangka komoditi batubara, karet, timah dan interest rate futures,” papar Roy.

Ditambahkan Roy, JFX telah menyelesaikan kajian awal kontrak interest rate futures. Dan dalam waktu dekat proposalnya akan disampaikan kepada Bappebti untuk memperoleh izin.

Di sisi lain, Roy Sembel mengungkapkan, tahun 2011 JFX mencatatkan tahun buku se nilai USD 10 juta dan diharapkan setiap tahunnya bisa tumbuh mencapai 10 % - 15 %. Dengan demikian rencana go public JFX di tahun 2015 menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. ▲



BAF Kembali Beroperasi

Kelapa Bappebti melalui Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 1551/BAPPEBTI/SA/01/2012, tertanggal 11 Januari 2012, mencabut pembekuan izin usaha sebagai pialang berjangka PT. Buana Artha Futures (BAF). Sebelumnya pada 9 Juni 2011, status izin usaha BAF dibekukan Bappebti berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 1328/BAPPEBTI/SA/06/2011.

Pembekuan izin usaha itu dilakukan berdasarkan surat Direktur Utama PT. Buana Artha Futures yang mengajukan permohonan Non-

Aktif Operasional untuk sementara waktu. Hal itu mengingat BAF mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan permodalan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Menurut Kepala Biro Hukum, Bappebti, Alfons Samosir, mengatakan, BAF telah melakukan perbaikan manajemen, baik dari sisi permodalan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku maupun adanya susunan pengurus terbaru.

“Mereka sudah datang dan melapor ke Bappebti untuk mengaktifkan kembali izin usahanya. Setelah kami pelajari semua dokumen yang diajukan dan ternyata sudah sesuai dengan

persyaratan, maka perusahaan ini layak untuk beroperasi kembali,” jelas Alfons.

Jadi, tambah Alfons, izin usaha PT. Buana Artha Futures telah aktif kembali per 11 Januari 2012. “Kami memberi apresiasi kepada manajemen BAF karena berkomitmen dan beritikad baik untuk melakukan perbaikan memenuhi segala ketentuan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan di bidang perdagangan berjangka komoditi,” tandas Alfons Samosir. ▲

BKDI Tambah Anggota Genjot PALN



Meningkatkan volume investasi nasabah di bidang perdagangan berjangka komoditi melalui penyaluran amanat ke bursa luar negeri (PALN), Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) di tahun 2012 menambah kontrak komoditi. Kontrak komoditi yang di-

maksud adalah kontrak berjangka komoditi perak.

Selain itu, BKDI juga telah memberi izin kepada PT Optima Futures Capital (OFC) sebagai perusahaan pialang yang bertransaksi untuk produk-produk PALN. Masuknya OFC menambah daftar perusahaan pialang berjangka anggota BKDI untuk transaksi PALN. Sebelumnya yang telah terdaftar yakni PT Sinarmas Futures dan PT Phillip Futures.

“Masuknya OFC dalam perdagangan PALN di BKDI diharapkan bisa menambah gairah investor transaksi multilateral. Selain itu, berkontribusi meningkatkan likuiditas bursa,” jelas Dirut BKDI, Megain Widjaja.

Lebih juah diutarakan Megain Widjaja, total transaksi PALN di BKDI pada tahun 2011 cukup signifikan perkembangannya baik dari sisi volume maupun jumlah kontrak komoditi

yang diperdagangkan.

“Saat launching perdana PALN pada April 2011, kontrak komoditi yang diperdagangkan sebanyak 5 kontrak. Tetapi sampai akhir 2011 menjadi 9 kontrak,” katanya.

Menurut Megain, sampai akhir 2011 total transaksi PALN di BKDI mencapai 766 lot, atau naik dari 108 lot di bulan April. Rincianya antara lain produk Mini Crude, volume transaksinya 74 lot, kemudian ada NBSU11 (produk gula) sebanyak 172 lot. Lalu juga produk Wheat, yang sampai akhir tahun mencatatkan transaksi 78 lot, Soy Oil sebanyak 20 lot, NBCOCO (kakao) sebanyak 62 lot, Corn dengan volume transaksi 218 lot, Mini Wheat sejumlah 14 lot, NBCoffee dengan volume transaksi 88 lot dan produk Crude dengan 40 lot.

Kontrak berjangka komoditi yang diperdagangkan melalui PALN itu, mengacu ke dua bursa berjangka Amerika yakni Chicago Mercantile Exchanges (CME) dan New York Board of Trade (NYBOT). ▲



Ekspor Lada Bakal Melonjak 246.045 Ton

Ekspor lada diprediksi akan mengalami kenaikan menjadi 246.045 ton di pasar internasional. Laporan International Pepper Community (IPC), ekspor lada hitam selama 2011 dari enam negara pengekspor utama yakni Brasil, India, Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Sri Lanka, mencapai 242.450 ton.

Laporan IPC juga menyebutkan bahwa produksi lada pada 2012 diprediksi mengala-

mi peningkatan dari 298.400 ton pada tahun 2011 menjadi 320.155 ton.

Sementara itu, total produksi lada Indonesia tahun 2011 mencapai sebesar 33.000 ton. Terdiri dari 18.000 ton lada hitam dan 15.000 ton lada putih. Jumlah tersebut lebih rendah dari tahun 2010 yang mencapai 59.000 ton yang terdiri dari 40.000 ton lada hitam dan 19.000 ton lada putih.

Penurunan produksi itu terjadi karena kondisi cuaca buruk selama masa berbunga

dan berbuah tanaman lada. Selain itu adanya hama dan penyakit, ditambah lagi sejumlah tanaman telah berumur tua.

Dari sentra produksi lada di Kab. Waykanan, Provinsi Lampung, dilaporkan harga lada hitam pada pekan kedua Januari 2012, tercatat mengalami penurunan. Harga lada hitam sebelumnya mencapai Rp 55.000/kg, dan mengalami penurunan menjadi Rp 46.000/kg. ▲

Ekspor Kakao Olahan Capai 350 Ribu Ton

Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) memperkirakan, ekspor kakao olahan pada 2012 bisa mencapai 350.000 ton. Jumlah itu mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu yang hanya 250.000 ton. Ketua Askindo, Zulhelfi Sikumbang, mengatakan, peningkatan ekspor terjadi karena adanya *over supply* kakao. Di sisi lain, krisis ekonomi Eropa dan Amerika Serikat, tidak akan berdampak langsung terhadap kinerja ekspor kakao olahan asal Indonesia.

"Kakao Indonesia tidak pernah ditolak oleh negara lain. Meski harga turun atau naik karena terjadi krisis, tapi pasar di sana tetap

ada," kata Zulhelfi.

menurut Zulhelfi, harga kakao olahan pada tahun 2012 akan mencapai sekitar USD 2.000 –USD 2.800 per ton. Harga itu hampir sama dengan 2011.

"Semenjak krisis Eropa dan over produksi dari Afrika Barat harga kakao sudah turun 40 persen," ujar Zulhelfi.

Data Kementerian Perindustrian mencatat, ekspor kakao olahan Indonesia meningkat dari USD 142 juta pada Januari – Mei 2010 menjadi USD 216,4 juta pada Mei 2011. Ada pun ekspor cokelat untuk periode yang sama naik dari USD 12,2 juta menjadi USD 16 juta pada 2011. Di sisi lain, ekspor biji koko turun dari USD 448,3 juta pada tiga bulan pertama tahun 2010 menjadi USD

289,4 juta pada 2011.

Terkait dengan produksi kakao 2012, Zulhelfi memprediksi akan mencapai 500.000 ton, atau naik dibandingkan 2011 yang sebesar 420.000 ton. Peningkatan produksi itu didorong oleh iklim cuaca yang baik. Sedangkan pada 2011, produksi merosot tajam akibat anomali cuaca yang buruk.

"Pada 2010 yang lalu produksi kakao Indonesia sempat mencapai angka 575.000 ton, sayangnya pada 2011 mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 420.000 ton karena musim kemarau bertemu dengan musim hujan," kata Zulheli Sikumbang. ▲

Pasokan Defisit Harga Karet Melejit

Harga karet di pasar internasional mulai bergerak naik seiring dengan peningkatan harga minyak mentah. Untuk kontrak pengiriman Juni 2012, harga karet sudah naik menjadi sebesar 280,3 Yen per kg atau setara dengan US\$ 3.648 per ton. Kenaikan harga itu sebagai antisipasi industri pengguna karet alam meningkatkan stok karena Thailand akan memasuki penurunan produksi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia, Azis Pane, menjelaskan, kenaikan harga karet juga disebabkan oleh kekurangan pasokan karet dunia.

Pada tahun 2011, produksi karet dunia 10,86 juta ton sementara kebutuhan dunia mencapai 10,9 juta ton, sehingga terjadi kekurangan pasokan sebesar 131.000 ton. Tahun 2012 ini diperkirakan produksi karet dunia sebesar 11,41 juta ton, sementara permintaan mencapai 11,49 juta ton atau masih defisit sekitar 77.000 ton.

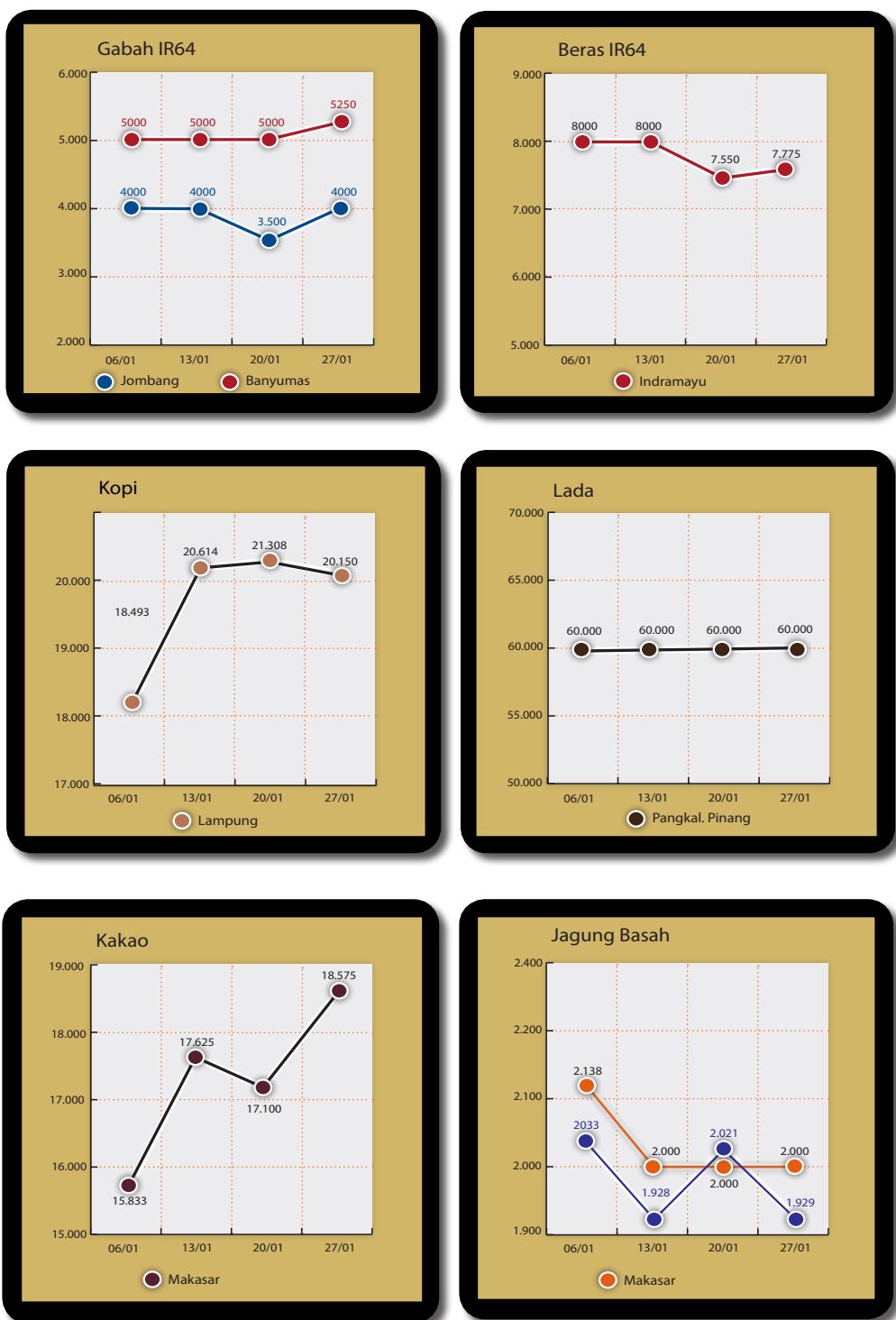
Menurut Azis, harga karet diperkirakan masih akan naik karena pemerintah Thailand yang memproduksi 30 % dari pasokan karet dunia berencana membeli 200.000 ton karet petani mereka. "Tetapi harga ini tidak akan naik gila-gilaan karena ada perlambatan ekonomi akibat krisis utang di Eropa."

Untuk menyesati kenaikan harga karet, menurut Azis, produsen ban akan melakukan efisiensi produksi baik dengan mengurangi buangan maupun efisiensi penggunaan energi. ▲



infoharga.bappebt.go.id

Harga Komoditi (Rp/Kg)





Wijen Minyak Nabati Sehat



Wijen-*sesamum indicum* yang termasuk dalam famili *pedaliaceae* merupakan tanaman semak semusim. Saat ini, Wijen dibudidayakan sebagai sumber minyak nabati yang dikenal sebagai minyak Wijen. Minyak Wijen diperoleh dari ekstraksi bijinya.

Dan di zaman modern ini, sejumlah negara cukup aktif membudidayakan tanaman Wijen untuk dijadikan minyak nabati. Hal itu karena minyak yang dihasilkan dari biji Wijen sangat baik untuk kesehatan. Sejumlah negara yang diketahui menjadi produsen minyak Wijen antara lain India, Cina, Mesir, Turki, Sudan, Meksiko, dan Venezuela. Sedangkan Indonesia juga sudah mulai membudidayakan tanaman ini. Namun, saat ini nilai impor Wijen masih cukup tinggi.

Tanaman Wijen diduga berasal dari wilayah Afrika, lalu menyebar ke Timur hingga ke India dan Cina. Umumnya penyebaran tanaman ini ke wilayah tropis, karena di wilayah tropis pertumbuhannya cukup baik.

Dalam kebudayaan India, minyak Wijen termasuk komoditi penting baik dalam berbagai masakan maupun untuk tujuan kesehatan. Dalam bahasa Tamil, minyak Wijen disebut *nalla ennai* atau dapat diartikan ‘minyak bagus’.

Suku Assyria yang berasal dari Irak, Iran, Turki dan Suriah, sejak sebelum 600 SM sudah diketahui memanfaatkan minyak Wijen sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Saat itu, minyak Wijen umumnya dikonsumsi kalangan ningrat suku Assyria karena harganya yang begitu mahal akibat langka. Dikalangan ini, minyak Wijen juga digunakan sebagai minyak gosok.

Cerita yang menarik tentang minyak Wijen juga datang dari umat Hindu. Di kala itu, orang Hindu memakainya sebagai minyak lampu, dan memperlakukannya sebagai minyak suci. Menurut kepercayaan Hindu, menyalaikan lentera berisi minyak Wijen di depan patung Hanoman dipercaya dapat menghilangkan kesulitan dalam hidup.

Indonesia pada mulanya tanaman Wijen terkonsentrasi di Pulau Jawa. Penanaman Wijen umumnya dijadikan tanaman tumpangsari dengan padi, palawija, dan tanaman lain di lahan kering pada musim penghujan. Namun kini penyebaran tanaman Wijen meluas sampai Provinsi Nusa Tenggara Barat terutama di Pulau Sumbawa karena amat cocok dibudidayakan di wilayah yang beriklim kering. Di Sumbawa Wijen dimanfaatkan sebagai tanaman tambahan untuk mengurangi risiko gagal panen karena hujan di pulau ini bersifat eratik, pendek dan sulit diramalkan.

Di Nusa Tenggara Barat tanaman Wijen sebelumnya diprimadonakan sebagai tanaman tumpangsari dengan palawija atau pagi gogo. Tetapi kini tanaman Wijen diarahkan ke sistem monokultur, terutama pada lahan-lahan di tepi hutan atau pulau terpencil, seperti di Pulau Sangiyang.

Selain dari Nusa Tenggara Barat, Wijen berkualitas baik juga berasal dari Sulawesi Selatan. Produksi Wijen dari dalam negeri sekitar 2.500 ton pertahun, sedangkan konsumsi Wijen mencapai 4.500 ton per tahun. Sehingga kekurangannya masih harus diimpor.

Di dalam negeri terdapat dua jenis Wijen yang dibudidayakan yaitu Wijen putih dan hitam. Dalam pengolahan makanan, Wijen putih lebih disukai tetapi nilai ekonomisnya tidak berbeda.

Varitas yang dianjurkan untuk dibudidayakan adalah varitas unggul Garati KKO, Marada Putih, Bogor Sutami

dan Marada Hitam dan varietas unggul harapan Sesamindo (Wijen varitas sate) serta Pachequino.

Di Indonesia Wijen memiliki nama yang berbeda-beda, di Jawa Barat dikenal dengan nama Walir, Bali, Gorontalo, Batak, dikenal dengan Lenga, Seram dan Rotte disebut Lena, Sulawesi Selatan disebut Langan, sedangkan di Nias disebut Longa.

Sekedar ilustrasi, budaya dan pengolahan biji Wijen di beberapa wilayah Jawa Tengah, seperti di Kabupaten Sukoharjo, Wonogiri, dan Rembang, cukup menjanjikan keuntungan besar. Hanya saja pasarnya belum begitu luas dan masih kalah bersaing dengan produk-produk impor. Dari satu hektar kebun tanaman Wijen, petani dari wilayah Kab. Sukoharjo, Wonogiri, dan Rembang, bisa meraih keuntungan sekitar Rp 4,6 juta per musim. Keuntungan itu diperoleh dari harga jual biji Wijen yang berkisar Rp 7.000 per kilogram.

Selain budidaya, petani di Kab. Sukoharjo, Wonogiri, dan Rembang, juga mengolah biji Wijen menjadi minyak dan kecap. Misalnya, Kelompok Wanita Tani (KWT) Putri Mandiri di Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo, menghasilkan minyak Wijen sekitar 200 liter/bulan. Di samping itu, mereka juga memproduksi kecap Wijen rata-rata 600 liter/bulan dengan merek “Golden Food dan Sehat”. Minyak Wijen ukuran 225 ml dijual dengan harga Rp 15.000, sedangkan kecap Wijen ukuran 630 ml dibandrol Rp 10.000.

Biji Wijen adalah sumber minyak nabati dengan kadar asam lemak jenuh yang rendah yang dapat dikonsumsi langsung, dalam bentuk minyak atau tepung. Selain itu, biji Wijen juga diperlukan untuk bahan baku industri seperti farmasi, kosmetika, pestisida dan obat-obatan. Biji dan minyak Wijen, secara tradisional, dimanfaatkan untuk mencegah beberapa penyakit. ▲



Wijen Cegah Penuaan Dini

Masih banyak orang yang tidak mengetahui manfaat besar dari biji Wijen terhadap kesehatan, padahal kualitas protein, vitamin B dan Kalsium yang dikandungnya begitu luar biasa. Setidaknya, dari 100 mg biji Wijen terkandung kalsium sekitar 1125 mg, jika dibandingkan dengan 2 gelas susu sapi segar yang hanya mengandung 600 mg kalsium.

Dari berbagai penelitian ilmiah juga diketahui biji Wijen mengandung 50-53 % minyak nabati, 20 % protein, 7-8 % serat kasar, 15 % residu bebas nitrogen, dan 4,5-6,5 % abu. Minyak biji Wijen juga kaya dengan asam lemak tak jenuh, khususnya asam oleat (C18:1) dan asam linoleat (C18:2, Omega-6), 8-10 % asam lemak jenuh, dan sama sekali tidak mengandung asam linolenat. Minyak biji Wijen juga kaya akan Vitamin E. Ampas biji Wijen setelah dilakukan ekstrak untuk diambil minyaknya

juga bisa dimanfaatkan menjadi sumber protein dalam pakan ternak.

Menurut Myra Sidharta dan Suryatin N Ganie, dalam bukunya berjudul "Dapur Naga di Indonesia", diungkapkan biji Wijen merupakan sumber asam amino esensial, yakni salah satu jenis asam amino yang harus didatangkan dari luar tubuh manusia. Keutamaan kandungan protein pada biji Wijen menjadikannya sebagai pengganti susu, telur, daging dan protein kedelai.

Selain itu, biji Wijen juga mengandung substansi lain yang dikenal dengan vitamin T. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa vitamin T penting dalam mempertahankan stabilitas dan kesehatan limfa.

Sementara itu, pakar tanaman herbal Indonesia, Prof. Hembing Wijayakusuma dalam bukunya berjudul "Tumbuhan Berkhasiat Obat Indonesia" dituliskan Wijen juga berkhasiat untuk pencegahan, pengobatan dan perawatan. Untuk langkah preventif Wijen berguna mencegah

kerontokan rambut, penuaan, kanker, penyakit degenratif, rambut beruban, stroke, hipertensi dan lain-lain.

Sementara untuk pengobatan, Wijen dapat dimanfaatkan dalam mengatasi penyakit batuk, katarak, sakit perut, sakit kepala, kencing nanah, kencing manis, sembelit, rematik dan luka-luka. Untuk perawatan, Wijen dapat meningkatkan fungsi liver, kecerdasan dan menghitamkan rambut.

Penggunaan Wijen dengan bahan lain juga berkhasiat. Misalnya, untuk mencegah penuaan, biji Wijen jika dicampur dengan kacang merah kecil dan gula merah dibuat bubur atau dimakan. Bila Wijen ditaburkan di atas makanan dan sayuran akan berkhasiat melancarkan asi dan mecegah rambut beruban. Kemudian untuk masalah degenratif yang dimanfaatkan adalah minyak Wijen. ▲



Isi Pokok UU No. 10/2011

Undang-undang No. 32/1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, telah mengalami perubahan signifikan setelah Komisi VI DPR RI melakukan amandemen dan disahkan bersama pemerintah melalui sidang paripurna pada 19 Juli 2011. Inti dari perubahan undang-undang ini yakni mengedepankan pengembangan dan pengawasan industri perdagangan berjangka di dalam negeri.

Di samping itu, terdapat perubahan dari sejumlah definisi dari komoditas, perdagangan berjangka komoditas, dan sejumlah istilah lainnya. Begitu pula dengan pengaturan sistem perdagangan alternatif

(OTC Derivatives), demutualisasi bursa berjangka, Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka dan transaksi perdagangan berjangka melalui elektronik.

Untuk pengawasan perdagangan berjangka, perubahan undang-undang tersebut mengatur secara sistematik prosedur penanganan kasus dengan memberikan penguatan dan perluasan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Di sisi lain, ada pula perluasan sanksi pidana terhadap praktik kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, serta seminar oleh pihak yang tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Berikut ini skema perbedaan antara Undang-undang No. 32/1997 dan No. 10/2011;

UU NO 32/1997

- ➔ Sangat Sempit.
- ➔ Hanya Mencakup Kebutuhan Primer.
- ➔ Didesain Hanya Untuk Transaksi di Bursa Berjangka.

DITETAPKAN
BERDASARKAN
KEPUTUSAN
PRESIDEN

UU NO 10/2011

COVERAGE KOMODITI SUBJEK KONTRAK BERJANGKA

- ➔ Sangat Luas.
- ➔ Mencakup Setiap Barang, Jasa, Hak, dan Setiap Derivatif Dari Komoditi.
- ➔ Dapat Menjadi Subjek Kontrak Derivatif, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya.
- ➔ Mencakup Transaksi Di Dalam Dan Di Luar Bursa Berjangka (OVER THE COUNTER) Atau SPA.

DITETAPKAN
BERDASARKAN
PERATURAN
KA. BAPPEBTI

SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

- ➔ Tidak Ada Pengaturan Sama Sekali Dalam UU NO 32/1997

SELAMA INI DIATUR DALAM
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEBTI
NOMOR 55 SEBAGAIMANA
DIUBAH DENGAN PERATURAN
KEPALA BAPPEBTI NOMOR 58
TENTANG SISTEM PERDAGANGAN
ALTERNATIF

- Sanksi Pidana:
- ➔ Belum Diatur Secara Tegas
 - ➔ Polisi Selalu Ragu Dalam
 - ➔ Menangani Perkara SPA

- ➔ SPA Diatur Secara Tegas Dalam BAB IIIA PS. 30A Dan PS.30B
- ➔ Hanya Dapat Dilakukan Oleh Penyelenggara SPA Dan Peserta SPA Yang Satu Dan Lainnya Tidak Berafiliasi Serta Telah Memperoleh Persetujuan BAPPEBTI.
- ➔ Sistem Perdagangan Elektronik Dalam SPA Wajib Memenuhi Persyaratan Yang Diatur Lebih Lanjut Oleh BAPPEBTI.

KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR DALAM PERATURAN KEPALA BAPPEBTI

- Sanksi Pidana Untuk Kegiatan SPA Illegal:
- ➔ Pidana Penjara Paling Singkat 5 (LIMA) Tahun Dan Paling Lama 10 (SEPULUH) Tahun Dan
 - ➔ Denda Paling Banyak RP.10.000.000.000,00 (SEPULUH MILIAR RUPIAH) Dan Paling Banyak RP.20.000.000.000,00 (DUA PULUH MILIAR RUPIAH).

KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PENDAFTARAN TRANSAKSI SPA

- ➔ TIDAK ADA PENGATURAN SAMA SEKALI DALAM UU NOMOR 32/199
- ➔ HANYA DIATUR DALAM PERATURAN KEPALA BAPPEBTI (NOMOR 70/BAPPEBTI/PER/7/2009)

➔ PENYELENGGARA SPA DAN PESERTA SPA WAJIB: MELAPORKAN setiap transaksi kontrak derivatif lainnya ke bursa berjangka dalam rangka pengawasan pasar. MENDAFTARKAN setiap transaksi kontrak derivatif lainnya ke lembaga kliring berjangka untuk dijamin penyelesaiannya.

SANKSI PIDANA:

- ➔ Penjara paling singkat 1 (SATU) tahun dan paling lama 4 (EMPAT) tahun; dan
- ➔ Denda paling sedikit RP1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH) dan paling banyak RP5.000.000.000,00 (LIMA MILIAR RUPIAH).

DEMUTUALISASI BURSA BERJANGKA

- ➔ Bursa tidak bersifat demutual, melainkan bersifat mutual
- ➔ Bursa non profit oriented
- ➔ Bursa bersifat membership

- ➔ Bursa bersifat demutual
- ➔ Bursa profit oriented
- ➔ Pemegang saham bursa tidak harus menjadi anggota bursa.

TUJUANNYA:

- ➔ AGAR LEMBAGA KEUANGAN SEPERTI PERBANKAN TERTARIK UNTUK MASUK KE BURSA
- ➔ PARA INVESTOR TERTARIK UNTUK MENANAM MODAL DI BURSA KARENA SUDAH PROFIT ORIENTED

ASOSIASI INDUSTRI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

- ➔ TIDAK ADA PENGATURAN SAMA SEKALI DALAM UU NOMOR 32/199

ASOSIASI INDUSTRI PERDAGANGAN BERJANGKA MERUPAKAN BADAN HUKUM

TUJUAN :

- ➔ UNTUK MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PARA ANGGOTANYA DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERDAGANGAN BERJANGKA PADA UMUMNYA
- ➔ MITRA BAPPEBTI DALAM HUMAN EDUCATION & EMPOWERING

LEMBAGA KLIRING BERJANGKA

- ➔ Badan hukum terpisah dari bursa berjangka
- ➔ Tidak ada pembatasan jumlah lembaga kliring berjangka

- ➔ Badan hukum yang:
Terpisah dari bursa berjangka dan bersifat mandiri; atau
Badan usaha yang merupakan bagian dari bursa berjangka
- ➔ Badan usaha yang menyelenggarakan tugas penerimaan dan pendaftaran penjaminan penyelesaian transaksi kontrak derivatif lainnya dari penyelenggara SPA dan peserta SPA, izin usahanya dapat diberikan kepada satu badan usaha.

TRANSAKSI MELALUI SARANA PERDAGANGAN ELEKTRONIK

- ➔ BELUM DIATUR SECARA TEGAS

- ➔ Pelaksanaan perdagangan berjangka melalui sistem perdagangan elektronis dapat dilakukan secara langsung oleh nasabah
- ➔ Dalam pelaksanaan perdagangan berjangka secara elektronis tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh nasabah, pialang berjangka wajib melaksanakan transaksi perdagangan berjangka setelah adanya perintah dari nasabah atau kuasanya.



Prof. Dr. Bustanul Arifin,
Guru Besar UNILA dan
Ekonom Senior INDEF-Jakarta

Kelembagaan Lumbung & Gudang Pangan

Eskalasi harga pangan yang terjadi di luar musim panen dan pada hari-hari besar nasional menjadi semakin memperkuat bukti bahwa desain kebijakan harga pangan saat ini tidak mampu menahan kenaikan dan fluktuasi harga. Sejak tahun 2005, kebijakan harga pangan semakin timpang karena Indonesia hanya mampu menetapkan sisi bawah saja melalui kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP). Pada sisi atas atau harga maksimum seakan dibiarkan bergerak tanpa batas, walaupun kebijakan subsidi harga bagi kalangan tidak mampu melalui program beras untuk keluarga miskin (raskin) masih tetap dipertahankan.

Kenaikan harga eceran beras kualitas medium sampai melewati Rp 7.500 per kilogram di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, dibiarkan merangkak naik karena Pemerintah memang tidak memiliki instrumen perlindungan harga seperti masa lalu melalui kebijakan harga atap (ceiling price policy). Pada masa lalu Indonesia juga mampu melaksanakan kebijakan harga dasar (floor price policy) yang melindungi petani dari dampak kejatuhan harga pada musim panen. Fluktuasi harga pangan tetap terjadi, tapi diupayakan tidak melebihi batas atas dan batas bawah yang sudah ditetapkan, sekaligus menjadi incentif bagi pelaku ekonomi pada bagian tengah (perdagangan, penggilingan, dan penyimpanan) dari rangkaian sistem tatanaga beras.

Menyadari instrumen kebijakan yang ada

saat ini tidak mampu meredam dan memecahkan disparitas harga pangan yang terlalu besar, muncul beberapa gagasan untuk mengaktifkan dan mengefektifkan kembali kelembagaan ketahanan pangan, termasuk pengembangan gudang pangan modern dan sistem kelembagaan dan lumbung pangan yang menyertainya, mulai dari tingkat pedesaan sampai ke tingkat perkotaan. Pemerintah pernah berupaya mengembangkan sistem kelembagaan "tunda jual" gabah, bahkan menjadikannya sebagai program utama pada masa administrasi Presiden Megawati, disamping jargon khas Menteri Pertanian Bungaran Saragih bernama "sistem dan usaha agribisnis."

Pada masa administrasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Pemerintah kembali menghidupkan gagasan kelembagaan tunda jual tersebut melalui pembangunan gudang-gudang modern, sekaligus pengembangan sistem tunda jual melalui kelembagaan sistem resi gudang (SRG). Sejak tahun 2009, pembangunan gudang-gudang modern tersebut dilakukan di 34 kabupaten/kota yang tersebar di 10 provinsi. Pembangunan gudang flat sebanyak 35 gudang digunakan untuk menyimpan gabah dan beras, sedangkan 6 gudang silo untuk menyimpan jagung (di Kabupaten Garut, Sumenep, Minahasa Selatan, Takalar dan Gorontalo).

Tambahan pembangunan 15 gudang pangan modern juga dilakukan di 15 kabupaten/kota yang dibiayai dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2010.

Gudang pangan modern tersebut diserahkan penggunaannya kepada pemerintah daerah setempat, untuk dijalankan oleh kelembagaan pengelola gudang yang berbentuk koperasi atau badan usaha milik daerah (BUMD) secara profesional. Pada tahun 2011 ini, gudang-gudang yang telah dilengkapi dengan mesin pengering (dryer) itu seharusnya sudah mulai beroperasi secara penuh.

Pengembangan aransememn kelembagaan ketahanan pangan melalui pembangunan gudang pangan modern tersebut secara akademik belum terlalu solid. Beberapa studi ex-ante sosial-ekonomi yang dilakukan tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Apabila beberapa studi lain yang telah dan akan dilakukan menunjukkan kecenderungan temuan yang hampir sama, maka bentuk pragmatisme kebijakan dengan mereduksi persoalan kelembagaan ketahanan pangan menjadi sekadar pembangunan gudang modern justru dapat berdampak kontra-produktif terhadap kinerja ketahanan pangan nasional.

Berikut beberapa penjelasan tentang kelembagaan ketahanan pangan yang dijmpai di Indonesia :

Pertama, kelembagaan lumbung pangan dan gadai gabah tidak layak secara finansial, sehingga cukup sukar jika akan dikembangkan dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam menunjang ketahanan pangan. Pada masa lalu, harga pangan relatif stabil – perbedaan harga tertinggi dengan harga terendah sekitar 10 persen, terutama karena fungsi stabilitas harga yang dijalankan Bulog

“Indonesia perlu secara serius mengembangkan sistem kelembagaan sistem resi gudang melalui pemberian subsidi bunga kredit resi gudang, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Resi Gudang (sebagai amandemen perundangan sebelumnya, UU 9/2006).”

relatif berhasil. Kini, pengembangan gudang modern itu hanya menghasilkan tambahan penerimaan ekonomi yang lebih kecil dibanding tambahan biaya penyimpanannya yang mencapai 35 persen. Implikasinya adalah bahwa petani dan masyarakat pedesaan tidak memiliki insentif yang cukup untuk melakukan kegiatan penyimpanan gabah dan beras.

Di samping itu, apabila pada periode pra-Bimas di tahun 1960-an dahulu, perbedaan harga terendah dengan harga tertinggi terjadi dalam satu tahun, kini perbedaan harga itu terjadi dalam setengah tahun saja karena perubahan varietas padi yang digunakan telah meningkatkan frekuensi panen menjadi dua kali setahun. Hasil studi Simatupang dan Syafaat (2002) tentang lembaga lumbung pangan pedesaan di Cirebon, Cianjur dan Tasikmalaya menunjukkan tingkat bunga pinjaman lumbung berkisar 3,1 – 3,7 persen per bulan untuk lama pinjaman 5,5 bulan, yang jauh lebih tinggi disbanding bunga pasar 2,0 persen per bulan. Untuk periode penyimpanan selama tiga bulan, tambahan penerimaan yang diperoleh karena kenaikan harga jual hanya sebesar 9,1 persen dari harga awal, yang lebih rendah dari tambahan biaya penyimpanan yang harus dikeluarkan sebesar 11,1 persen.

Kedua, perubahan yang sangat cepat terjadi pada aspek eksternal kelembagaan ketahanan pangan tidak dapat diimbangi oleh perubahan di dalam lingkungan internal lumbung pangan di pedesaan. Dalam bahasa ekonomi, tingkat keseimbangan antara “batas luar” dan “batas dalam” suatu organisasi tidak terjadi, sehingga pressure dari luar terlalu besar untuk dapat dikelola oleh unsur-unsur internal lumbung pangan.

Misalnya, perbedaan harga di tingkat petani tidak semata-mata ditentukan oleh faktor musim panen, tetapi juga oleh harga paritas impor gabah, yang juga dipengaruhi harga beras internasional dan nilai tukar rupiah. Perubahan basis sosial menjadi basis ekonomi lumbung pangan juga duitunjukkan oleh perubahan orientasi dan motivasi usaha setiap anggota untuk memanfaatkan jasa dan pelayanan yang ditawarkan lumbung, misalnya usaha simpan-

pinjam. Perubahan sistem pemilihan pengurus dan pimpinan lumbung pangan, dari bentuk panutan yang melibatkan tetua adat, menjadi sedikit terbuka dan demokratis tentu saja amat mempengaruhi posisi (positioning) yang sebenarnya dari lumbung pangan dalam konteks ketahanan pangan.

Ketiga, sistem tukar-menukar dengan uang (*monetary system*) yang telah memasuki seluruh lapisan masyarakat sampai ke pelosok-pelosok tanah air menjadi faktor yang amat penting dalam menganalisis kontribusi lumbung pangan dalam konteks ketahanan pangan yang lebih luas. Implikasinya adalah sistem kelembagaan atau aturan main di dalam lumbung pangan tidak dapat lagi diletakkan hanya pada romantisasi masa lalu, tetapi harus berhubungan dengan property rights dalam upaya pengembangan kelembagaan pangan baik di pedesaan, maupun di perkotaan.

Tidak mungkin, suatu sistem yang tertutup akan bertahan lama di tengah *pressure* yang makin kuat dari masyarakat tentang keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas di setiap manajemen barang dan kebutuhan publik. Artinya, ketahanan pangan tidak akan pernah tercapai apabila lumbung pangan hanya bersifat defensif seperti masa lalu dan hanya sebagai cadangan pangan masyarakat. Ketahanan pangan perlu lebih berdimensi dinamis dan berupaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Sebagai penutup, agar suatu kelembagaan ketahanan pangan tidak hanya menjadi terbaus pada tataran akademisi, maka kelembagaan lumbung pangan harus mampu men-support bekerjanya pasar, khususnya untuk komoditas pangan dan bahan pangan. Dalam konteks struktur pasar, sekian macam asimetri pasar dan asimetri informasi mewarnai ekonomi beras nasional (dan internasional). Struktur pasar beras sangat jauh dari tingkat persaingan sempurna, karena formasi harga ditentukan di pusat-pusat perdagangan yang sangat jauh dari pusat produksi di pedesaan. Implikasinya adalah bahwa hanya dengan upaya modernisasi dan peningkatan skala usaha lumbung pangan pedesaan tidak akan serta-merta meningkatkan derajat ketahanan

pangan pada lapisan masyarakat terbawah.

Apalagi, hampir seluruh lapisan masyarakat tahu bahwa aktor ekonomi yang terlibat dalam ekonomi pangan tidak semuanya berperan sebagai penerima harga (*price taker*) seperti halnya petani. Pedagang umumnya jauh lebih sejahtera (*well-off*) karena mereka dapat mempengaruhi harga, jika tidak dikatakan sebagai penentu harga (*price determinator*). Pedagang besar dan penggilingan (*miller*) dengan modal besar tidak jarang melakukan upaya penyimpanan (dan penimbunan?) beras pada saat-saat sulit, dan bahkan menentukan jenis merk dagang beras sesuai dengan perkembangan dan kecenderungan pasar.

Simplifikasi solusi kebijakan pemotongan rantai tatanaga pangan dengan memasukkan unsur koperasi pedesaan (KUD) di dalamnya bukan merupakan jaminan bahwa kelembagaan pangan akan lebih efisien. Terlalu banyak bukti empiris bahwa koperasi pedesaan justru memetik keuntungan super-normal atas disparitas harga bahan pangan. Mereka yang amat kental berhubungan dengan sistem birokrasi logistik yang tertutup justru menjadi pemburu rente (*rent-seeker*) yang meresahkan.

Indonesia perlu secara serius mengembangkan sistem kelembagaan sistem resi gudang melalui pemberian subsidi bunga kredit resi gudang, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Resi Gudang (sebagai amandemen perundangan sebelumnya, UU 9/2006). Subsidi bunga ini disalurkan untuk jangka waktu enam bulan melalui bank-bank pelaksana yang ditunjuk Menteri Keuangan: Bank Jabar-Banten, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank BRI dan Bank Kalsel. Dalam hal ini, Pemerintah menanggung selisih bunga yang dibebankan kepada peserta sistem resi gudang sebesar 6 persen dari tingkat bunga komersial. Singkatnya, pengembangan kelembagaan lumbung pangan yang diintegrasikan dengan pola manajemen gudang pangan modern dan sistem resi gudang akan mampu memperbaiki kinerja dan memperkuat ketahanan pangan di Indonesia. ▲

(sumber: metrotu.com)



Export Target in 2012 Reaches US\$ 230 Billion

Trading Ministry set an export target in 2012 for US\$ 230 Billion. This target will be reached through export value increasing through downstream policy for agricultural industry such as cacao, palm, rattan and rubber.

Trade Minister, Gita Wirjawan, believed this target can be achieved by influx of foreign investment in 2012.

"The Investment will give added value and export capacity," Gita explained at end year

performance press convention on the 30th of December 2011.

In addition, Indonesia did not only depend on downstream policy as Indonesia will push trading ahead on non-traditional market such as Latin America, Middle East and East Europe. The estimation of trading growth for that sector is 25% in 2012.

According to Gita, government push trading ahead on no-traditional market as in 2012 the trading volume for countries who lead world growth and developing countries are predicted will be

higher than developed countries. It's described that import will be growth 8.1% and export 7.8%.

"The growth estimation of developed country economic in 2012 is 1.9% for example USA will grow 1.8%, German 1.3%, France 1.4%, Japan 2.3% and England 1.6%. For developing countries, it's projected with their moderate growth. The growth prediction for ASEAN-5 which are Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Philippine is 5.6%," Gita Wirjawan explained. ▲

INTR is The World First Export Import Information Warehouse

Indonesia has export-import information warehouse that was claimed by government as the first in the world. This facility name is Indonesia National Trade Repository (INTR) which will open the possibility for amateur exporter or importer to start exporting -importing.

"INTR consists of thousand rules of export-import and the HS (harmonize system) code for every commodity item will be easier to be shown along with agency contact information. It means all information is available there. This is the world first trade repository," said Deputy of Industry & Trade coordination sector of Economical Coordinator Ministry, Edy Putra Irawady lately in Jakarta.

According to Edy, INTR is part of online integrated customs service system (INSW). INTR becomes INSW supporting facility that will be launched on the 28th – 29th of January 2012 along with other facility.

"The launching will be along with Single Sign On (SSO) facility, I-CARE, port expansion, improvement of airport service and INTR," Edy said.

SSO itself is a facility that can be used by exporter and importer to access government agency service that relates to International trading. However, as a new start, SSO only can be used to access Food and Drug Control Foundation.

"As of port expansion that can serve INSW done to Merak Port, Djunda Airport Surabaya, Airport Bandung and Halim Perdanakusumah Airport," explained Edy Putra Irawady. ▲



Export Embargo Pushed Rattan Downstream Industry

Government policy to stop rattan export effectively on the 1st of January 2012, is addressed to maintain the balance of sustainable threshold of rattan and forest resources. Moreover, is also addressed to increase the utilization of rattan product industry and export, and also to prevent smuggling as a result of export permissibility of certain rattan.

According to Trade Minister, Gita Wirjawan, the termination of rattan raw material export is believed to be absorbed by domestic industry. Moreover, the future development of production centers will not only concentrate in Java but also will be developed throughout Indonesia.

"The other important thing from this policy is the business development for foreign technology transfer that is important for increasing product quality through design development," Gita said.

Following that rattan export embargo launching, a packet of measurement was also launched that consists of Trading Minister Policy of rattan export which includes export prohibition of random rattan, raw rattan, and semi-finished rattan. Moreover, Trading Minister policy on rattan inter-island transport and Trading Minister policy on storable goods of warehouse receipt system were also launched.

While Industrial Minister policy was also launched consists of Industry Minister regulation on changes of Industry Minister regulation number 119/M-Ind/Per/10/2009 on Furniture industry cluster development guidance map.

The same thing also done by Forestry Ministry who launched a policy on National arrangement of sustainable rattan production plan in 2012 which came from the use and collection of non rattan forest product that was loaded by legal UPHBBL or IPHHBK. ▲



Jeffrey Tjhe

OCF 'Anak Kandung' BKDI

PT Optima Capital Futures (OCF) berkomitmen mendobrak dan turut andil dalam pengembangan industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia. Hal itu dibuktikan menjadi anggota Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) dan lembaga kliring Identrust Security International (ISI). Menerima izin sebagai perusahaan pialang berjangka dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) pada 21 Desember 2011, OCF merupakan 'anak kandung' pertama dari BKDI. Karena dari data yang ada, OCF murni berdiri dan berkecimpung diindustri perusahaan berjangka dimulai dari BKDI. Sedangkan perusahaan pialang berjangka anggota BKDI lainnya sudah lebih dahulu beroperasi dari Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).

Menurut Direktur Utama OCF, Jeffrey Tjhe, dibalik berdirinya OCF terdapat sebanyak delapan orang pendiri yang usianya rata-rata di bawah 30 tahun.

"Kami dari delapan orang ini berteman sejak kecil dan memiliki latarbelakang pendidikan yang beragam. Suatu ketika di tahun 2010, setelah saya menyelesaikan pendidikan dari *Seattel University*, kami kumpul dan berbincang-bincang untuk merintis sebuah usaha baru," tutur Jeffrey Tjhe.

Lalu, tambah Jeffrey, ketika itu saya mengusulkan untuk mendirikan usaha di bidang investasi komoditi. Saya mengusulkan di bidang itu karena saat kuliah saya pernah mengikuti investment club yang ada di *Seattel University*. Dari investment club itu, saya ketahui bahwa bursa

berjangka komoditi di Amerika Serikat sangat maju dan memiliki pengaruh pada perekonomian dunia.

"Ini lah peluang dan tantangannya bagi kami. Indonesia begitu kaya dengan komoditi yang dibutuhkan dunia tetapi bursa berjangka komoditi belum maju seperti di Amerika," papar Jeffrey.

Singkat cerita, kata Jeffrey, setelah pertemuan itu kami berdelapan sepakat melakukan observasi dan mendirikan perusahaan ini.

Mengapa memilih menjadi anggota BKDI? Menurut pria kelahiran Jakarta, April 1987, ini, ada beberapa alasan. "Dari fakta yang ada, perusahaan pialang berjangka yang bertransaksi untuk kontrak multilateral sangat jarang mengalami kebangkrutan. Fakta ini tidak saja di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Mengapa bisa demikian, karena untuk kontrak komoditi lebih aman baik bagi investor maupun perusahaan pialang."

"Di samping itu, kami berdelapan pendiri OCF memiliki obsesi menjadi pioner untuk kontrak berjangka multilateral tidak hanya di bursa Indonesia tetapi juga bursa asing," jelas anak ketiga dari enam bersaudara ini.

Berkaitan dengan obsesi itu, OCF di tahun pertama ini akan lebih memprioritaskan sosialisasi dan edukasi perdagangan berjangka.

"Kami sudah merencanakan beberapa program seperti seminar, road show dan menjadi sponsor di beberapa kegiatan terkait dengan perdagangan berjangka komoditi," jelasnya.

Dengan berbagai strategi itu, target kami dalam lima tahun ini OCF sudah diperhitungkan sebagai perusahaan pialang berkredibilitas tinggi,

kata Jeffrey lebih jauh. Karena itu pula kami sudah mempersiapkan tim marketing handal di bidang kontrak multilateral.

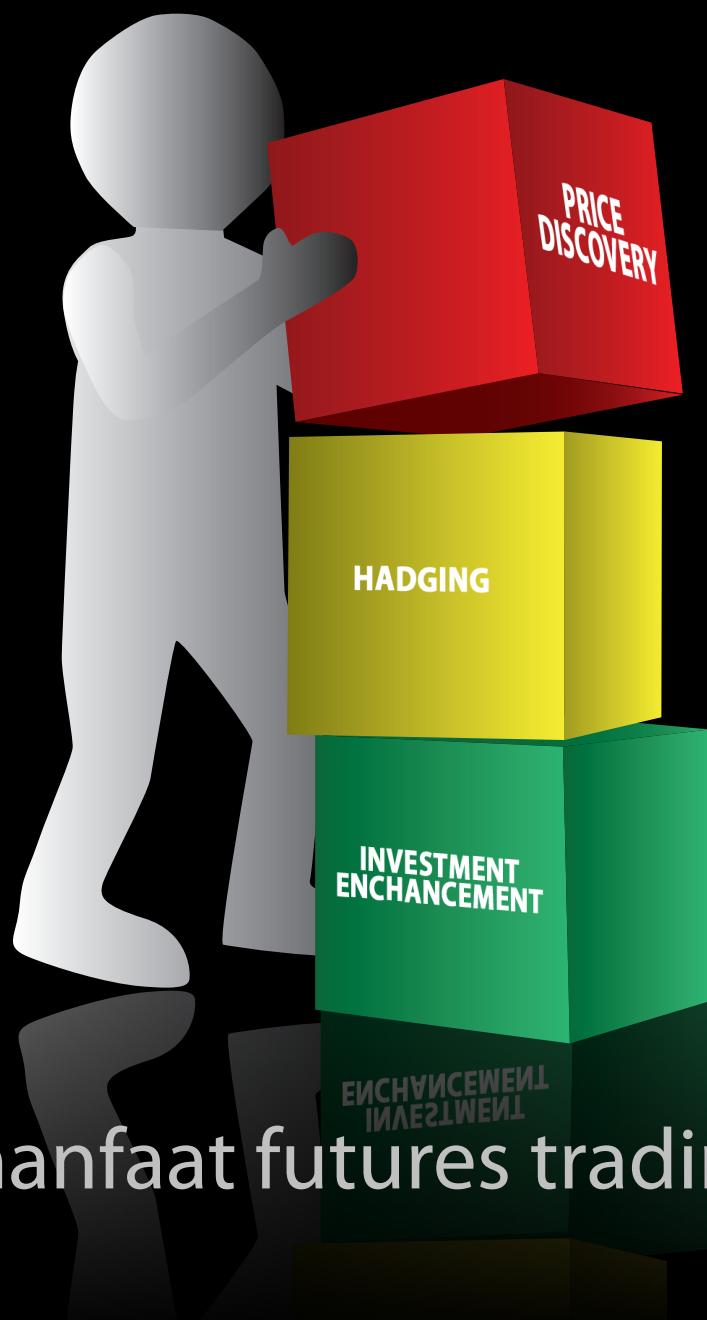
Jeffrey Tjhe, mengakui, sejak beroperasi 3 Januari 2012, OCF sudah memiliki sejumlah investor. "Jujur kami katakan, ditahap awal investor yang bertransaksi di OCF berasal dari jaringan para pendiri. Inilah salah satu keunggulan kami, karena dari delapan pendiri OCF cukup aktif melakukan edukasi dan sosialisasi," kata pria yang mengaku sudah memiliki pacar ini.

Dari sejumlah kontrak berjangka komoditi yang diperdagangkan BKDI, investor OCF lebih memilih kontrak berjangka emas. "Prinsipnya sebagai perusahaan pialang kami menawarkan seluruh kontrak berjangka yang diperdagangkan BKDI, tetapi investor lebih cenderung memilih kontrak berjangka emas. Hal itu mungkin dikarenakan tren komoditi emas saat ini cukup memberi peluang pasar bagi kalangan investor," ungkap Jeffrey.

"Umumnya investor yang ada saat ini pun sudah cukup *familiar* dengan komoditi emas. Karena pemberitaan trend pasar emas, serta mereka pun berinvestasi di saham," ujar pehobi bulutangkis ini.

Terkait pengembangan OCF membuka cabang di daerah, Jeffrey Tjhe, menjelaskan, kami belum berpikir membuka cabang di daerah. Karena prioritas kami dalam lima tahun ini lebih kepada menciptakan image.

"Tetapi kalau ada kebutuhan mendesak, tentunya peluang membuka cabang di daerah akan kami upayakan," tandas Jeffrey Tjhe. ▲



“manfaat futures trading”